

BAB III

POTRET WARTAWAN DI KOTA SEMARANG

Bab ini menyajikan sejumlah temuan penelitian yang merupakan hasil dari wawancara mendalam dengan para informan dan pengamatan di lapangan. Informan yang dimaksud adalah para wartawan yang merupakan subyek utama dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian meliputi pemahaman kalangan profesional media terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), soal kesejahteraan wartawan, praktik-praktik amplop wartawan, besaran amplop yang diterima wartawan, alasan-alasan kenapa mau menerima amplop, dan lain-lain. Temuan-temuan penelitian dalam bab ini adalah hasil wawancara mendalam dengan 11 jurnalis dari televisi lokal, media cetak lokal, media cetak nasional, radio, online, dan televisi nasional.

Karena praktik wartawan amplop dianggap sebagai masalah sensitif maka peneliti menyembunyikan identitas para informan. Peneliti hanya menyebut informan dengan menggunakan inisial huruf W-1, W-2, W-3 dan seterusnya hingga W-11. Peneliti lebih memilih penyebutan W-1, W-2 (wartawan satu, wartawan dua) dan seterusnya untuk memudahkan penyebutannya.¹ Sebab, jika disebut inisial maka bisa menimbulkan multitafsir

¹ Adapun keterangan W-1, W-2 dan seterusnya dapat dilihat di bab I dalam sub subyek penelitian. Selain itu, transkrip wawancara dengan para jurnalis juga kami sajikan dalam lampiran penelitian ini. Adapun penentuan inisial W-1, W-2 dan seterusnya adalah berdasarkan pada urutan pada saat wawancara.

bagi pembaca. Selain itu, peneliti juga tidak akan menyebutkan nama perusahaan media tempat para jurnalis bekerja.²

3.1. Pemahaman Jurnalis tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Seperti yang sudah diungkap di bab I bahwa Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah pedoman-pedoman moral bagi profesional media dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai wartawan. Ketika dikemukakan pertanyaan tentang pemahaman KEJ, para jurnalis terbelah menjadi dua, yakni ada yang sudah pernah membaca tapi ada pula yang belum pernah membaca KEJ sama sekali. Bagi wartawan yang sudah pernah membaca mengungkapkan bahwa KEJ bagi mereka sangat penting karena menjadi rambu-rambu untuk menunjukkan mana praktik jurnalistik yang boleh dan mana yang tidak. Sedangkan jurnalis yang belum pernah membaca KEJ menyatakan belum tahu seberapa pentingnya KEJ tersebut.

Ketidaktahuan jurnalis terhadap KEJ disebabkan karena tidak semua jurnalis memiliki latar belakang pendidikan yang terkait dengan ilmu jurnalistik atau kewartawanan. Seperti yang kita tahu bahwa untuk menjadi seorang jurnalis bisa berlatarbelakang dari manapun. Banyak wartawan yang tidak berpendidikan ilmu komunikasi atau jurnalistik. Banyak pula wartawan yang tidak memiliki latar belakang pengalaman jurnalistik pada saat mereka mengenyam pendidikan di bangku kuliah.³ Bahkan, para wartawan sebenarnya tidak memiliki cita-cita untuk bergelut di dunia kewartawanan. Informan W-1

² Alasan peneliti tidak menyebutkan perusahaan medianya adalah karena masalah praktik amplop adalah masalah yang sensitive sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang menyudutkan orang atau pihak-pihak tertentu.

³ Para jurnalis banyak yang tidak ikut pers kampus atau lembaga pers mahasiswa (LPM).

(jurnalis televisi lokal) mengungkapkan pada saat dirinya lulus dari kuliah, lalu dihadapkan pada kebutuhan pekerjaan maka dia mendaftarkan diri di perusahaan media. Setelah diterima, dia langsung diterjunkan di lapangan untuk meliput berita. Sedangkan informan lain berinisial W-6 (jurnalis televisi lokal lainnya) mengungkapkan bahwa dirinya menjadi wartawan karena keterpaksaan akibat membutuhkan pekerjaan.

Pemahaman jurnalis tentang KEJ juga tak lepas dari minimnya proses pendidikan dan pelatihan yang diberikan perusahaan media kepada para jurnalisnya. Seringkali, perusahaan media absen memberikan pendidikan atau pelatihan kepada para pekerja medianya. Selama ini, banyak perusahaan media yang memberikan pelatihan kepada wartawannya sekedar pelatihan teknik-teknik, misalnya teknik wawancara dengan narasumber, cara-cara atau proses pembuatan berita, dan pengetahuan teknik-teknik lainnya. Sangat jarang perusahaan media yang menjangkau hingga materi KEJ secara lebih mendalam. Salah satu jurnalis televisi lokal berinisial W-1 mengungkapkan bahwa dari kantornya hanya ada pelatihan pembuatan berita. “Itu pun tidak pasti. Kalau yang etika malah nggak pernah,” katanya. Pada saat masuk kerja pertama kali juga tidak ada penekanan soal etika jurnalistik. “Saya hanya tanda tangan kontrak,” kata W-1. W-1 mengaku dirinya memang belum pernah membaca KEJ. Sedangkan di salah satu stasiun radio,

W-4 menyatakan bahwa dulu di perusahaannya ada pelatihan bagi jurnalis yang baru masuk. “Tapi harus diakui sudah dua tahun ini jarang, kayak semacam pelatihan-pelatihan nggak ada,” katanya. Jurnalis yang masuk ke

perusahaan media melalui perekrutan sendiri, tidak bersama-sama dalam perekrutan secara terbuka, juga tidak mendapatkan pelatihan dari perusahaannya. Sebab, kata W-2 (jurnalis cetak lokal), dirinya masuk ke perusahaan media tersebut tidak melalui tes secara bertahap. Tapi dia bisa masuk ke perusahaan itu melalui rekomendasi seseorang. Akibatnya, karena sendirian maka tidak ada proses pelatihan-pelatihan. Karena dianggap sudah memiliki latar belakang jurnalis, pada saat diterima maka dia langsung diturunkan di lapangan untuk meliput berita.

Jurnalis yang berstatus hanya sebagai koresponden atau kontributor juga tidak pernah mendapatkan pelatihan dari perusahaan medianya. Sebab, hubungan antara jurnalis dengan perusahaan medianya bukanlah selayaknya seperti karyawan. Mereka menulis berita dikirim ke perusahaan, jika beritanya dimuat maka akan mendapatkan honor. Tapi jika berita yang dikirim tidak dimuat maka tidak dapat honor. Pola hubungan seperti ini menjadikan hubungan jurnalis koresponden dengan perusahaan media hanya sebatas kebutuhan berita. Sedangkan soal pelatihan dan pengembangan kapasitasnya diserahkan kepada masing-masing individu. W-5, salah satu jurnalis dengan status koresponden media cetak nasional mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan pemahaman KEJ bukan dari pelatihan di perusahaan media, tapi berangkat dari keinginan pribadi untuk terus belajar. Salah satunya dari organisasi profesi. Namun, sayangnya tidak semua wartawan ikut organisasi profesi.

Sedangkan W-9 (koresponden televisi nasional) mengungkapkan bahwa selama ini pelatihan dari perusahaan medianya hanya seputar teknis pembuatan berita dan evaluasi materi pemberitaan. “Biasanya, produser dari Jakarta menelpon wartawan di daerah, memberikan pengetahuan tentang cara-cara pengambilan berita yang baik,” kata W-9.

Kebanyakan perusahaan media massa memang tidak memberikan pemahaman KEJ secara mendalam kepada wartawannya. Namun, ada salah satu media nasional yang memberikan pelatihan kepada wartawannya selama tiga bulan berturut-turut. W-11, salah satu wartawan di perusahaan media tersebut menyatakan materi pelatihan tidak hanya soal teknis pembuatan berita tapi juga menyangkut soal KEJ. Sebelum diturunkan ke lapangan, wartawan di media nasional ini digembleng terlebih dahulu selama tiga bulan di ruang-ruang kelas. Setelah itu, tiga bulan berikutnya magang untuk terjun ke lapangan. Dalam proses itu ada evaluasi-evaluasi. Jika dinilai tak layak maka jurnalis akan gugur. Salah satu penilaian kelayakan adalah jurnalis tidak meminta atau menerima amplop dari narasumber. “Jika diketahui menerima amplop maka langsung gugur,” kata W-11.

Terlepas seorang jurnalis pernah membaca KEJ atau tidak, ternyata pemahaman jurnalis terhadap KEJ tidak menjadi penentu apakah jurnalis bersikap menolak amplop ataukah tetap mau menerima amplop. Sebab, di antara jurnalis yang sudah pernah membaca kode etik, dan bahkan dia memandang bahwa KEJ ini sangat penting, tapi yang bersangkutan tetap mau menerima amplop. Salah seorang jurnalis televisi lokal (W-6) menyatakan

antara nilai idealitas KEJ dengan praktik di lapangan sulit dikompromikan. “Ada kode etik itu manakala saat gaji dan kesejahteraan sudah sesuai dengan yang diharapkan wartawan. Sesuai dengan kapasitas dan keringat yang dipekerjakan. Kalau memang itu belum atau jauh dari harapan maka kode etik sulit diterapkan,” kata wartawan lajang tersebut. Ada pula jurnalis yang memandang bahwa KEJ sangat penting untuk rambu-rambu wartawan. Tapi ketika sudah ada di lapangan, wartawan ini juga tidak bisa menahan untuk menolak amplop yang diberikan narasumber.

W-7 (jurnalis cetak lokal) menyatakan bahwa KEJ sangat penting untuk rambu-rambu. “Nggak boleh ini atau nggak boleh itu,” katanya. Namun, dia sendiri mengakui bahwa KEJ sulit diterapkan di lapangan. Banyak pelanggaran terjadi. “Termasuk menerima *ojir* (amplop),” katanya.⁴

Ada pula wartawan yang sudah pernah membaca kode etik dan dia benar-benar mematuhi KEJ tersebut, terutama menolak imbalan atau suap dari narasumber. W-2, salah satu jurnalis cetak lokal menyatakan KEJ sangat penting karena sebagai alat untuk melakukan pekerjaannya. “KEJ sebagai rambu-rambu atau gaman (senjata) kita. Kode etik merupakan aturan yang harus dipatuhi. Kalau tidak melakukan kode etik maka kelayakan dia disebut jurnalis akan kurang atau bahkan tidak layak disebut jurnalis sama sekali,” kata W-2. Sedangkan W-11 (cetak nasional) yang sudah pernah membaca KEJ tapi mengaku tidak hafal pasal per pasal menyatakan bahwa KEJ sangat penting. Di

⁴ Istilah lain yang digunakan para wartawan di Semarang untuk menyebut amplop adalah *Jaran* (kuda). Istilah ini diadopsi dari bahasa atau sandi yang sering digunakan para anggota kepolisian pada saat mendapatkan hasil uang.

perusahaan medianya, para wartawan sudah tahu kode etiknya masing-masing sehingga jika ada wartawan yang diketahui menerima amplop maka langsung dipecat.

Sedangkan W-3 juga menyatakan bahwa KEJ sangat penting karena menjadi acuan bagi para wartawan dalam berpraktik bekerja di lapangan. Tidak hanya masalah larangan menerima amplop, tapi banyak juga rambu-rambu yang harus dipatuhi karena kerja wartawan berakibat pada efek ketika kita berhubungan dengan publik. Misalnya, kata W-3, liputan yang berkaitan dengan kebijakan, kepentingan orang banyak atau berita hukum. Jika wartawan tidak tahu untuk hindari jeratan-jeratan hukum maka itu sangat berbahaya. Sebab, kata W-3, jurnalis tiap hari harus terlibat dengan berita publik. “Yang kita hadapi bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi kita menghadapi orang yang paham banyak hal,” katanya.

3.2. Pandangan Jurnalis terhadap Amplop

3.2.1. Definisi dan Kategori Amplop

Di kalangan jurnalis sendiri, definisi atau kategori pemberian apa yang masuk kategori amplop dan yang tidak masih selalu berbeda-beda. Ada yang memaknai bahwa jenis amplop dari narasumber yang dilarang dalam KEJ adalah hanya sebatas uang atau *fresh money*. Tapi ada pula yang menganggap bahwa fasilitas-fasilitas yang diberikan narasumber adalah bentuk lain dari amplop yang bisa digunakan untuk menjinakan jurnalis. Seorang jurnalis radio, W-4 menyebut bahwa yang masuk kategori amplop itu hanya yang berbentuk *fresh money* yang mungkin dalam jumlah nominal tertentu. Uang tersebut, kata

dia, yang diberikan ke wartawan entah dengan embel-embel pengganti uang transportasi atau ucapan terima kasih atau bahkan dengan pesan: “tolong ini berita dimuat”. “Tapi kalau makan, souvenir itu mungkin hanya pemberian biasa,” kata W-4.

Hal yang sama disampaikan W-6 (jurnalis televisi lokal). “Amplop itu ya yang *fresh money*,” katanya. Tapi, kata dia, itupun pada saat ada kaitan dengan isu pemberitaan. “Tidak bisa dikatakan sebagai amplop jika ada narasumber mengajak mengobrol lalu pergi ke mana, lalu memberikan *fresh money* atau makan, maka itu bukan amplop karena tidak ada konteks dengan pemberitaan,” kata W-6. Namun, ada pula yang menganggap bahwa pemberian fasilitas-fasilitas—seperti souvenir, akomodasi, penginapan, makan-makan dan lain-lain—termasuk bentuk lain dari amplop wartawan. “Sama saja, cuma beda bentuk,” kata W-7, jurnalis cetak lokal yang juga selalu menerima amplop.

Khusus pemberian barang, kira-kira barang apa yang dilarang karena dikhawatirkan akan bisa mempengaruhi independensi dan obyektivitas pembuatan berita. Apakah souvenir seperti pulpen atau mug gelas yang diberikan panitia kegiatan kepada jurnalis harus juga ditolak? Para jurnalis memberikan jawaban beragam. W-11 (jurnalis cetak nasional) mengakui masalah seperti itu memang subyektif. Sebab, di perusahaannya sendiri tidak ada aturan tertulis yang rigid. Namun, kata dia, jika diberi sesuatu maka harus dilaporkan ke kantor. “Kalau nilai barangnya tinggi, seperti handphone atau jam tangan maka nanti akan dikembalikan, Tapi kalau barang-barang yang nilai harganya kecil seperti kaos atau flas dish maka tetap laporan ke kantor tapi

biasanya di kumpulin di sekretariat. Barang-barang yang sudah terkumpul itu biasanya akan dibagi-bagikan bersama-sama pada saat akhir tahun. Tapi ada pula jika nilai barangnya rendah maka itu untuk wartawannya sendiri ga masalah,” kata W-11.

Sedangkan W-2 (jurnalis cetak lokal) menganggap bahwa batasan amplop wartawan sangat ketat. Menurutnya, semua imbalan harus ditolak. Tapi, W-2 mengakui bahwa kadang di lapangan ada pemberian yang sulit dihindari untuk ditolak. Misalnya, pemberian souvenir atau diajak makan dengan narasumber. Padahal, kalau amplop sangat ketat maka pemberian makan pun tidak boleh karena itu bentuk lain dari amplop. Persoalannya, apakah mungkin di sebuah acara orang-orang yang lain makan tapi jurnalis tidak mau makan? W-2 memberikan tips untuk disiasati. “Misalnya dengan mengajak narasumber mengobrol. Atau kita merokok sambil santai-santai untuk mengalihkan perhatian pada saat teman-teman kita makan,” katanya.

Kategori amplop yang lebih detail disampaikan W-3 (jurnalis freelance media luar negeri). W-3 mengungkapkan bahwa selama mungkin pemberian itu jika diuangkan minimal seharga Rp 10 ribu maka itu termasuk amplop. “Tapi itu diluar makanan atau alat tulis,” kata dia. W-3 memberikan contoh jika jurnalis menjadi peserta seminar dan diberi pulpen dan makanan maka itu tidak termasuk amplop. “Atau souvenir kecil seperti mug yang ga akan mengikat wartawan untuk menulis obyektif atau tidak,” kata W-3. W-3 memberikan contoh pemberian barang yang termasuk amplop adalah seperti televisi, handphone, tape, black berry dan lain-lain.

Lalu bagaimana dengan pemberian fasilitas transportasi dan akomodasi yang diberikan narasumber kepada wartawan pada saat meliput, terutama liputan di luar kota. Misalnya, seorang pejabat melakukan kunjungan kerja ke sebuah daerah. Pejabat tersebut menyediakan alat transportasi dan penginapan bagi para wartawan yang ikut meliput. Pertanyaannya, apakah fasilitas transportasi itu masuk kategori amplop atau tidak? Jika masuk kategori amplop, lalu bagaimana caranya ikut liputan pejabat tersebut? Sebab, jika tidak ikut rombongan maka bisa jadi jurnalis akan ketinggalan momentum pemberitaan sang pejabat.

Menghadapi persoalan seperti ini, jurnalis memiliki pandangan berbedabeda. Ada sebagian jurnalis yang memandang bahwa fasilitas itu tidak termasuk amplop. Tapi ada pula yang memandang bahwa fasilitas seperti itu termasuk amplop. Jurnalis yang menganggap fasilitas transportasi dan akomodasi sebagai bukan amplop beralasan bahwa jika tidak ikut rombongan maka sulit mendapatkan materi berita. “Saya hanya menyebut amplop itu yang berbentuk *fresh money*,” kata W-4 (jurnalis radio).

Sedangkan jurnalis yang memandang bahwa fasilitas transportasi sebagai amplop karena sebenarnya perusahaanlah yang wajib memberikan fasilitas itu, bukan narasumber. Lalu, bagaimana jika tidak ikut rombongan maka bisa ketinggalan momentum acara kunjungannya? W-2 (jurnalis cetak lokal) menyatakan bisa disiasati dengan datang lebih cepat. Tapi, kata dia, jika memang tidak bisa disiasati, misalnya agenda kunjungannya ke luar negeri maka ketika tidak bisa ditolak ya tidak apa-apa. “Tapi kalau kita masih mampu

untuk tetap mandiri maka harus dilakukan. Misalnya: masa' liputan di Ungaran yang bisa dijangkau naik motor sendiri kenapa tidak dilakukan," kata W-2.

Sedangkan W-3 (jurnalis freelance) menyatakan bahwa persoalan fasilitas transportasi dan akomodasi itu sangat tergantung. Ia mencontohkan kalau ada event lalu panitia menanggung kebutuhan jurnalis tanpa akan mengikat jurnalis maka itu tidak masalah. "Kecuali yang mewah yang bisa pengaruhi wartawan. Selama ala kadarnya sih nggak masalah. Selama aku bisa menulis kritis diluar dan selama itu wajar-wajar saja. Toh itu bukan uang pribadi panitia," kata W-3.

W-5 (koresponden cetak nasional) menyatakan ada batas-batas mana fasilitas yang masuk kategori amplop dan mana yang tidak. W-5 mencontohkan undangan makan bersama yang wajar tidak termasuk amplop. Menurutnya, ukuran wajar memang relatif tetapi tetap bisa dibedakan dengan yang mewah. Sebab, kata W-5, bagaimanapun wartawan tetap butuh hubungan baik dengan narasumber dengan cara menghadiri acara makan bersama narasumber. Namun, W-5 menambahkan seharusnya batasan seperti ini diatur dengan detail, tegas dalam kode etik jurnalistik. "Sayangnya masih sangat kompromistis sehingga relatif *"nggrambyang* (masih belum jelas atau abu-abu)," katanya.

3.2.2. Sikap Jurnalis terhadap Amplop

Di kalangan wartawan, masih sangat beragam dalam memandang amplop dari narasumber. Sebagai gambaran umum, dari 11 informasi jurnalis yang diwawancarai dan diamati di lapangan, sebanyak tujuh jurnalis di antaranya mau menerima amplop. Sedangkan empat jurnalis lainnya tidak mau

menerima amplop. Masing-masing jurnalis dalam mengambil keputusannya memiliki alasan-alasan sendiri. Untuk mempermudah penjelasan alasan-alasan itu berikut kami sajikan tabel sikap jurnalis terhadap amplop:

Tabel 3.1

Sikap jurnalis terhadap amplop beserta alasannya:

Informan wartawan	Sikap terhadap amplop
W-1 (televisi lokal)	Mau menerima dengan alasan dianggap sebagai rezeki
W-2 (media cetak lokal)	Menolak karena larangan KEJ. Jika menerima amplop akan malu
W-3 (freelance)	Menolak karena bertentangan profesi wartawan
W-4 (jurnalis radio)	Menerima karena amplop dianggap sebagai pengganti uang transport saja
W-5 (cetak nasional)	Menolak karena bertentangan dengan KEJ
W-6 (televisi lokal)	Menerima amplop karena dianggap sebagai rezeki
W-7 (cetak lokal)	Menerima amplop karena sebagai rezeki
W-8 (media online)	Menerima
W-9 (televisi nasional)	Menerima amplop karena amplop sudah seperti menjadi budaya
W-10 (cetak lokal)	Menerima amplop karena dianggap sebagai rezeki
W-11 (cetak nasional)	Menolak karena bisa melecehkan profesi wartawan dan membuat berita bias

W-4 (wartawan radio) menjelaskan bahwa sikap para wartawan menanggapi amplop memang berbeda-beda. Ia mengelompokan ada tiga kategori wartawan kaitan dengan amplop. *Pertama*, wartawan yang sama sekali tidak mau menerima dan tidak diperbolehkan menerima amplop. *Kedua*, wartawan yang mau menerima amplop dan diperbolehkan menerima amplop. Tapi wartawan jenis ini tidak meminta dan memaksa-maksa narasumber

memberikan amplop. *Ketiga*, ada kelompok wartawan yang selalu menerima amplop. Kalau tidak ada tetap upayakan harus ada amplop. Jenis wartawan ketiga itu adalah wartawan bodrek.

W-4 menyatakan kenyataan di lapangan menunjukkan memang ada teman-teman wartawan yang memaksa meminta amplop kepada para narasumber. W-4 mengaku dirinya masuk kategori yang kedua, yakni mau menerima amplop tanpa harus meminta-minta atau memaksa. “Saya menerima amplop tanpa meminta dan berita saya buat seobyektif mungkin,” katanya.

W-6 (televisi lokal) menyatakan dirinya menghukumi amplop sebagai hal yang makruh. Terlepas dari itu, kata dia, banyak sekali filosofi tentang amplop. Ada yang menganggap bahwa amplop itu sebagai rejeki, ada juga itu disebut upah dari narasumberr kepada wartawan, ada yang menganggap itu sebagai hal negatif karena wartawan akan bisa dikondisikan, ada yang filosofi bahwa itu ucapan terima kasih serta ada yang filosofi itu sebagai nilai *reward* dari narasumber karena selama ini sudah memberitakan yang bagus-bagus.

Namun, kata W-6, budaya amplop juga tidak sepenuhnya kesalahan wartawan. W-6 menuding *mainset* birokrasi yang sangat butuh pencitraan. “Jika ada birokrasi yang melanggar aturan maka media harus mengkritisnya. Tapi kecenderungannya itu malah dijadikan politisasi pihak-pihak tertentu,” katanya. Maksudnya, jika ada kesalahan atau ada penyelewengan maka para pejabat menutup-nutupinya. W-6 meminta kalau ada kebijakan di birokrasi tidak tepat ya diakui saja. Tidak perlu memberikan tips ke wartawan. *Counter attack* pun untuk mengklarifikasi hal yang diperlukan tidak dengan cara memberikan

amplop. Biasanya, kalau ada sebuah isu yang ramai dibicarakan tapi tidak lama kemudian isu itu akan hilang. “Itu ya karena pemberian tips,” katanya.

3.4. Relasi Wartawan dengan Perusahaan Media

3.4.1. Upah dan Kondisi Kerja Jurnalis

Salah satu isu menarik terkait dengan kerja jurnalis adalah masalah kesejahteraan. Selama ini, jurnalis masuk kategori sebagai buruh di perusahaan media. Mereka menerima gaji dan tunjangan dari perusahaan media layaknya sebagai buruh. Meskipun sebenarnya profesi jurnalis dalam praktiknya berbeda jauh dengan buruh. Sebab, jurnalis memerlukan keahlian khusus. Cara kerjanya juga sangat padat, tidak terikat dengan waktu. Kapan saja jika ada peristiwa yang harus diliput maka dia harus segera turun ke lapangan meliputnya. Nah, salah satu isu menarik kaitannya dengan praktik amplop di jurnalis adalah masalah gaji atau kesejahteraan.

Ada yang menyatakan bahwa selama ini karena gaji yang diterima jurnalis masih minim maka praktik amplop di kalangan jurnalis semakin marak. Mereka dengan bebas menerima amplop dari para narasumber dengan alasan gaji yang mereka terima dari kantor belum memadai. Apakah, pernyataan itu benar? Lalu bagaimana kesejahteraan jurnalis di Semarang, terutama yang berasal dari gaji dan tunjangan di perusahaan? Berikut hasil penelitiannya. Selama ini, setidaknya ada dua sistem ikatan jurnalis dengan perusahaan media, yakni jurnalis dengan ikatan sebagai karyawan dan jurnalis yang hanya sebagai kontributor.

3.4.1.1. Gaji dan Tunjangan Jurnalis Berstatus Kontrak atau Karyawan Tetap

Dengan sistem kerja ikatan kontrak atau karyawan tetap di perusahaan media, maka para jurnalisnya akan menerima gaji secara bulanan. Membuat berita berapapun, gajinya akan tetap sama. Jurnalis akan menerima gaji yang rata-rata besaran per bulannya sama. Produktifitas mengirimkan berita yang dilakukan jurnalis hanya akan memengaruhi penilaian dari perusahaan. Banyaknya berita yang dikirim tak berpengaruh besar pada besaran gaji yang akan diterima jurnalis. Sebab, dengan ikatan kontrak atau karyawan tetap maka gaji yang diterima adalah flet per bulan. Perusahaan media yang menggunakan sistem gaji bulanan biasanya media-media lokal, baik itu cetak lokal, televisi lokal maupun radio lokal.

Biasanya, sebelum perusahaan media mengangkat seorang jurnalis sebagai karyawan tetap maka jurnalis harus melewati dulu status kontrak. Masing-masing perusahaan memiliki perusahaan media di Semarang menerapkan jenjang karir yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang menerapkan status kontrak per tahun kepada karyawan selama hamper lima tahun tapi belum juga diangkat menjadi karyawan tetap. Tapi ada pula perusahaan media radio yang memberlakukan status kontrak karyawan hanya dua tahun, setelah itu karyawan tersebut diangkat jadi karyawan tetap.

W-7 (jurnalis cetak lokal) menyatakan sejak masuk di perusahaannya pada 2006 lalu hingga kini masih berstatus sebagai karyawan kontrak. “Coba bayangkan, sejak 2006 sampai sekarang masih kontrak,” katanya mengeluh.

Kontrak tersebut diperbaharui setiap tahunnya. Lalu, berapa gaji yang diterima W-7? Laki-laki yang sudah punya anak tiga ini menyatakan gaji pokok yang diterimanya per bulan adalah sebesar Rp 975 ribu. Gaji pokok itu dicairkan setiap tanggal 25. Diluar gaji pokok masih ada tunjangan dan bonus-bonus. “Ada uang bensin dan *tetek bengek*-nya (dan lain-lainnya) total Rp 500 ribu yang cair setiap tanggal 1,” kata W-7. Bonus itu itu termasuk bonus produktivitas pengiriman berita. Setiap berita, memiliki poin tersendiri, misalnya berita headline dapat 6 poin, berita kilas dapat 2 poin dan seterusnya. “Nah poin-poin itu diakumulasikan. kalau dapat poin 300-an dapat bonus Rp 200 ribu. Kalau dapat 200 poin ke bawah dapat bonus Rp 100 ribu,” kata W-7. Sedangkan W-2 (cetak lokal yang sama) juga mengakui bahwa setiap bulan dirinya memperoleh pendapatan dari perusahaan sebesar Rp 1,4 juta, terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dan bonus.

Status karyawan kontrak juga masih disandang W-1 (jurnalis televisi lokal) yang sudah bekerja sejak dua tahun lalu. Pada 2011, gaji yang diterima W-1 adalah sebesar Rp 800 per bulan. Gaji sebesar itu sudah melalui beberapa tahap kenaikan. Saat bekerja pada tiga bulan pertama, W-1 digaji sebesar Rp 350 ribu per bulan. Tiga bulan berikutnya naik Rp 500 ribu per bulan. Selanjutnya, tiga bulan berikutnya naik jadi Rp 650 ribu per bulan. Berikutnya naik menjadi sebesar Rp 800 per bulan.

W-1 terang-terangan berharap agar gajinya bisa dinaikan lagi. Sebab, gaji Rp 800 ribu per bulan itu masih dibawah besaran upah minimum Kota Semarang 2011 yang besarnya Rp 961.323. Soal tunjangan atau bonus, W-1

mengaku hanya mendapatkan uang pengganti bensin, yakni Rp 10 ribu per hari. “Tapi rata-rata saya hanya ambil dua hari sekali,” kata dia.

Sedangkan W-4 (jurnalis radio) menyatakan dirinya bekerja di perusahaan sudah hampir empat tahun. Sistem kerjanya adalah tiga bulan pertama kontrak. Lalu ada evaluasi. Apabila sesuai yang diharapkan perusahaan maka dilanjut dengan kontrak satu tahun pertama. “Jika cocok maka tahun kedua sudah bisa jadi karyawan,” kata dia. W-4 mengaku menerima gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan lainnya antara Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan.

Seorang jurnalis televisi lokal berinisial W-6 menyatakan dirinya masih berstatus kontrak dengan gaji Rp 1.250.000 per bulan. Gaji tersebut masih ditambah beberapa tunjangan, yakni uang bensin per bulan Rp 200 ribu, uang service motor dua bulan sekali Rp 50 ribu, uang lembur Rp 150 ribu per bulan, serta ada subsidi beras 10 kilo gram per bulan. Adapun W-10 (jurnalis cetak lokal) menerima gaji dari kantornya sebesar Rp 1,2 juta per bulan. “Istilahnya itu sudah *take home pay* (seluruhnya),” kata jurnalis yang juga masih berstatus karyawan kontrak ini.

Gaji dan tunjangan yang agak besar diterima oleh salah satu wartawan media cetak nasional. W-11 (jurnalis media cetak nasional) menyatakan pada saat awal masuk kerja dirinya sudah digaji Rp 2,8 juta per bulan. “Lalu naik terus setiap tahun. Sekarang gaji pokok saya sekitar Rp 4 juta (per bulan),” kata W-11 yang bekerja sejak tahun 2007 lalu ini. Awalnya, W-11 berstatus magang,

lalu naik menjadi calon reporter. Jika lolos tahapan-tahapan evaluasi maka baru diangkat menjadi karyawan. Sekarang, W-11 sudah berstatus karyawan tetap.

Tak hanya gaji pokok, W-11 juga menerima berbagai tunjangan, yakni tunjangan transportasi Rp 700 ribu per bulan, tunjangan pulsa Rp 300 ribu per bulan, uang makan Rp 25 ribu per hari. Tidak hanya berhenti disitu. Perusahaan media cetak nasional ini juga memberikan tunjangan anak kepada para wartawannya. Namun, karena W-11 belum mengambil tunjangan anak itu maka tidak tahu berapa besarnya. Selain itu, W-11 juga akan menerima tunjangan kesehatan jika sewaktu-waktu sakit. “Biaya pengobatan bisa diklaim ke kantor,” katanya. Ada juga fasilitas pinjaman uang untuk membeli rumah tanpa bunga. Tapi khusus untuk pinjaman tanpa bunga hanya bagi mereka yang sudah bekerja minimal lima tahun ke atas.

Selanjutnya, apakah para jurnalis yang menggunakan sistem ikatan kontrak atau karyawan dengan sistem gaji bulanan sudah merasa bahwa gaji dan tunjangannya sudah cukup memadai? Para jurnalis memiliki jawaban beragam. W-7 (wartawan cetak lokal) yang menerima gaji pokok Rp 975 ribu ditambah tunjangan lain-lain sebesar Rp 500 ribu merasa bahwa pendapatannya memang belum ideal. Dengan tiga anak, maka gajinya kadang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan W-4 (jurnalis radio) yang mengaku menerima gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan lainnya antara Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan merasa gaji yang diterimanya juga tak cukup. “Idealnya, gaji akan cukup memenuhi kebutuhan ya minimal Rp 2 juta per bulan,” kata W-4. Sedangkan W-11 (jurnalis cetak nasional) yang menerima

gaji pokok Rp 4 juta dengan tambahan berbagai tunjangan merasa bahwa pendapatannya sudah sangat mencukupi.

3.4.1.2 . Gaji dan Tunjangan Jurnalis Berstatus Koresponden atau Kontributor

Biasanya, perusahaan media yang menggunakan koresponden di Semarang adalah media-media yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan media di Jakarta membutuhkan jurnalis untuk ditempatkan di Semarang tanpa berstatus sebagai karyawan tetap tapi hanya kontributor. Hampir seluruh stasiun televisi nasional mempekerjakan wartawan di daerah, termasuk di Semarang. Ada juga beberapa media cetak nasional yang lebih memilih status koresponden daripada mengangkat karyawan. Ikatan yang hanya kontributor ini juga memiliki implikasi dalam masalah gaji.

Dengan status koresponden maka perusahaan media hanya memberikan gaji sesuai dengan jumlah berita yang dimuat atau ditayangkan. Jika seorang kontributor mengirimkan berita dan ditayangkan atau dimuat maka dia akan mendapatkan gaji dari perusahaan media. Tapi jika berita tersebut tak dimuat maka jurnalis tidak akan mendapatkan imbalan dari perusahaan media. Makanya dalam sistem kontributor, semakin banyak berita yang dimuat/ditayangkan maka perolehan gajinya akan semakin banyak. Sebaliknya, jika berita yang termuat atau ditayangkan sedikit maka gaji yang diterimanya juga akan semakin sedikit.

Besaran imbalan per berita yang diberikan perusahaan media juga sangat beragam. Biasanya, semakin sulit perusahaan media menayangkan atau memuat

berita maka semakin besar nilai harga per beritanya. Tapi perusahaan media yang materi beritanya mudah tayang maka harga beritanya juga semakin murah. Karena gaji yang diterima disesuaikan dengan jumlah berita maka pendapatan jurnalis dengan status koresponden atau kontributor selalu tidak pasti.

W-3 (jurnalis kontributor media luar negeri) menyatakan dirinya digaji per paragraf di laporan berita. “Per paragraf dihargai sebesar Rp 250 ribu,” kata mantan wartawan cetak lokal tersebut. Di luar gaji Rp 250 ribu per paragraf itu, W-3 tidak menerima tunjangan atau bonus, kecuali kalau W-3 ditugaskan perusahaan untuk meliput sebuah peristiwa di luar daerah. Meski harga per berita sangat tinggi, tapi berita-berita yang layak dimuat di media luar negeri ini sangat sulit. Kriterianya sangat berat. W-3 mencontohkan, peristiwa kerusuhan Temanggung pada 8 Pebruari lalu saja perusahaannya tidak berminat membuat beritanya. “Mungkin karena tidak ada korban, atau kerusuhannya hanya sesaat,” kata dia.

Sedangkan W-9 (jurnalis televisi nasional) menyatakan harga per berita yang dibeli perusahaan medianya adalah sebesar Rp 250 ribu. Namun, kata W-9, tidak semua berita layak dan bisa diterima redaktur di Jakarta. Sebab, media televisi membutuhkan gambar yang bagus. “Kalau hanya berita pernyataan maka sulit tayang,” kata dia. Untuk itu, W-9 hanya mengandalkan berita-berita peristiwa, seperti unjuk rasa, kebakaran, pembunuhan dan lain-lain.

Untuk wilayah liputan di Semarang, W-9 cukup beruntung karena di Ibukota Jawa Tengah ini banyak peristiwa atau kejadian yang bisa diliput. Dalam sebulan, W-9 mengaku bisa mengirimkan sekitar 40 berita. Dari jumlah

pengiriman sekitar 40 berita itu, rata-rata sekitar 30 berita di antaranya ditayangkan. W-9 menyatakan jika ada 30 berita dikalikan Rp 250 ribu maka sudah ada gaji Rp 7,5 juta per bulan. Namun, penerimaan itu masih kotor, karena dari perusahaan televisi nasional ini tidak ada bonus atau tunjangan tambahan. W-9 menceritakan, dulu pernah ada sistem tunjangan dan pemberian fasilitas. Seluruh keperluan saat meliput ditanggung perusahaan, mulai dari fasilitas transportasi, bensin, biaya pengiriman kaset dan lain-lain. Namun, harga per berita hanya Rp 75 ribu. Sistem itu kemudian diganti dengan sistem per berita Rp 250 ribu dengan konsekuensi seluruh fasilitas ditarik.

Harga per berita bisa dibilang kecil adalah yang diterima W-8 (jurnalis media online nasional). Harga per berita yang diterima W-8 sangat bervariasi. Ada kategori berita mulai dari berita dengan bobot A, B, C hingga D. “Ya rata-rata sekitar Rp 25 ribu per berita. Kalau paling kecil Rp 15 ribu kalau paling besar Rp 30 ribu,” kata W-8. W-8 mengaku setiap bulan berita yang dikirim dirinya bisa dimuat hingga 70 berita. “Itu jumlah rata-rata,” kata mantan mahasiswa jurusan filsafat yang bekerja mulai awal 2009 lalu itu. W-8 menyatakan jika dirinya dinilai bekerja cukup bagus maka ada kemungkinan untuk mengikuti pendidikan di kantor Jakarta. Biasanya, setelah lulus pendidikan maka ada kemungkinan untuk diangkat sebagai karyawan tetap.

Sementara itu, W-5 (kontributor media cetak nasional) menyatakan gaji yang diterima kontributor memang tidak pasti. Tergantung seberapa lincah kontributor membuat inisiatif berita. Selain itu, juga tergantung situasi dan kondisi wilayah liputan. Pada saat wilayah liputan banyak peristiwa maka bisa

jadi kontributor akan “panen” karena bisa mendapatkan berita banyak. Sebaliknya, jika tidak ada peristiwa yang layak berita maka berita akan sepi. W-5 mengaku setiap bulan dirinya mampu mendapatkan gaji kurang lebih Rp 1,5 juta.

Bagi jurnalis dengan status kontributor atau koresponden, pada saat ditanyakan apakah gajinya sudah cukup memadai? Jawaban mereka juga beragam. W-9 (jurnalis televisi nasional) mengaku dengan harga per berita Rp 250 ribu maka sudah sangat cukup. W-9 mencontohkan rata-rata per bulan dirinya mampu membuat berita hingga 30 yang bisa tayang. Jika Rp 250 ribu dikalikan 30 maka Rp 7,5 juta. “Dengan uang Rp 7,5 juta untuk hidup di Semarang sudah lebih dari cukup,” kata dia. Namun, para jurnalis dengan status koresponden lainnya tidak bisa mengukur apakah gajinya sudah mencukupi atau tidak. Sebab, gaji yang mereka terima dari satu bulan ke bulan berikutnya selalu tidak sama. Jika ada berita ramai di wilayah liputan, atau sering berinisiatif membuat berita yang bagus maka peluang dimuatnya berita menjadi besar. Jika berita sering dimuat maka pendapatan mereka akan semakin besar.

3.4.2. Serikat Pekerja dan Kepemilikan Saham Perusahaan

Serikat pekerja menjadi salah satu isu penting karena dengan serikat maka posisi karyawan (wartawan) dihadapan perusahaan media bisa memiliki bargaining. Dengan adanya serikat pekerja maka diharapkan bisa memperjuangkan hak-hak jurnalis. Namun, para jurnalis di Semarang yang ditemui peneliti menyatakan tidak tahu menahu mengenai masalah serikat pekerja di perusahaan medianya. Sangat jarang ada wartawan di perusahaan

media yang ikut aktif di serikat pekerja. Bahkan, di Semarang sendiri tidak ada wartawan yang membuat serikat pekerja di perusahaan medianya.

W-2 (cetak lokal) mengaku tidak tahu kenapa di perusahaan medianya tidak ada serikat pekerja. “Mungkin tak membutuhkan atau memang tidak tahu soal serikat pekerja,” ujarnya. Sedangkan W-6 (televisi lokal) memperkirakan bahwa serikat pekerja tidak ada karena bisa dikatakan itu justru akan menjadi batu sandungan bagi perusahaan media. Sedangkan W-8 (jurnalis online) menyatakan serikat pekerja di perusahaan Jakarta ada tapi yang wartawan di Semarang tidak ada atau tidak ikut terlibat sama sekali. W-9 (koresponden televisi nasional) menyatakan bahwa para karyawan di perusahaan televisinya yang ada di Jakarta memang membuat serikat pekerja. Namun, kata W-9, serikat pekerja tersebut hanya menampung karyawan yang ada di Jakarta. Serikat pekerja tidak mengakomodir koresponden yang ada di daerah.

Selain masalah gaji dan tunjangan, masalah lain yang juga terkait dengan kesejahteraan buruh adalah masalah kepemilikan saham. Persoalan keikutsertaan wartawan dalam memiliki saham digulirkan dengan asumsi agar para karyawan di perusahaan media, termasuk wartawan, memiliki posisi di hadapan perusahaan. Masalah saham kolektif di perusahaan media ini bermula dari Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/PER/MENPEN/1984, pasal 16. Disana disebutkan, perusahaan media diwajibkan memberikan saham kolektif yang besarnya 20 persen kepada karyawan.⁵

⁵ Pengaruh pemilik media dan kepemilikan saham dengan otonomi keredaksian memang menjadi salah satu masalah media di era reformasi saat ini. Annet Keller, Koresponden *Surat Kabar The Asia Pacific Times* dan lulusan S2 bidang jurnalistik dan ilmu politik di Leipzig Jerman menemukan bahwa media massa yang dinilai paling independen adalah surat kabar yang

Saham kolektif itu umumnya diberikan perusahaan dalam bentuk saham kosong. Karyawan mendapat bagian saham tanpa perlu menyetor modal. Tetapi bukan hibah karena saham itu diberlakukan sebagai hutang. Kalau perusahaan untung, deviden tidak dibayarkan kepada karyawan tetapi dipakai sebagai cicilan utang. Jika nasib baik maka setelah tahun kesekian cicilan bisa lunas sehingga karyawan bisa mendapatkan deviden. Saham itu juga bukan saham atas nama, jadi dimiliki secara kolektif dan tidak bisa diwariskan.

Kepemilikan saham kolektif di perusahaan media digulirkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat posisi wartawan di hadapan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham itu diharapkan karyawan bisa ikut menentukan dan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan lebih memperhatikan kesejahteraan wartawan. Saat bergulirnya masa reformasi 1998, Permenpen Nomor 01/PER/MENPEN/1984 itu diganti dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan No.132/1998. Pencabutan Menteri

tidak memiliki pemilik saham mayoritas. Sebab, dominasi kepemilikan saham membuat ketidakindependenan redaksi dibawah pemodal. Annet Keller melakukan penelitian kebijakan redaksi di empat media cetak nasional, yaitu *Kompas*, *Koran Tempo*, *Media Indonesia* dan *Republika*. Annet Keller menyimpulkan ternyata sistem kepemilikan dan struktur redaksional dalam perusahaan media berpengaruh pada tingkat otonomi redaksi dan isi berita. Hasil penelitian Keller menunjukkan bahwa wartawan yang bekerja pada surat kabar yang pemiliknya tidak punya latar belakang jurnalisme menerima intervensi yang dominan dari para pemilik modal, hal ini dialami oleh *Media Indonesia* dan *Republika*. *Media Indonesia* bahkan menempatkan salah seorang staf non-redaksional saat berlangsungnya rapat redaksi. Sedangkan wartawan *Republika* diperkenankan untuk menerima iklan dari klien lalu mendapatkan presentase hasil iklan.

Sedangkan *Koran Tempo* menurut Annet Keller dinilai sebagai media yang memiliki otonomi redaksi dan isi berita paling independen. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemilik modal yang dominan yang menguasai *Koran Tempo*. Sedangkan *Kompas* menurut Annet Keller lebih suka bermain aman. Jakoeb Oetama menyebutnya *Kompas* mengadopsi gaya "Jurnalisme Kepiting" yang berjalan maju namun mundur kembali. Namun *firewall* yang paling terlihat jelas terdapat di *Kompas* dimana divisi redaksi dan marketing berada di tempat terpisah dan tidak saling mengenal. Annet menyimpulkan bahwa media massa yang dinilai paling independen adalah surat kabar yang tidak memiliki pemilik saham mayoritas. Media tersebut adalah *Koran Tempo*. Annet Keller; *Tantangan dari Dalam, Otonomi Redaksi di 4 Media Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia; 2006*.

Penerangan itu terutama menyangkut peraturan baru tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Di era kebebasan, SIUPP sudah tidak lagi menjadi syarat penerbitan perusahaan media.

Peneliti menemukan bahwa masalah saham kolektif di perusahaan media untuk wartawan di Kota Semarang ternyata masih jauh dari panggang api. 11 informan wartawan di Semarang yang diwawancarai peneliti, hanya ada satu yang menyatakan wartawan diperusahaannya ikut memiliki saham kolektif di perusahaan, yakni W-11 (cetak nasional). W-11 mengaku tidak tahu menahu soal sistem dan mekanisme saham kolektif tersebut. Yang jelas, setiap tahun W-11 ikut dapat pembagian deviden dari perusahaannya. Besaran yang diberikan biasanya tergantung masa kerja, yang masih baru dapat sedikit tapi yang masa kerjanya sudah lama ya dapat banyak. "Terakhir saya dapat deviden Rp 4 juta," kata W-11 yang sudah bekerja selama empat tahun. Bonus tahunan ini layaknya gaji ke-13, seperti yang selama ini biasa diterima para pegawai negeri sipil.

Sedangkan di perusahaan-perusahaan media lainnya, para wartawan di Semarang mengaku tidak ada yang ikut memiliki saham di perusahaan. Sebab, rata-rata perusahaan media yang ada didirikan atau dimiliki seorang pengusaha. Sedangkan para wartawan adalah karyawan yang bekerja di perusahaan milik pengusaha tersebut. Alih-alih bisa ikut memiliki saham perusahaan, para wartawan di Semarang menyatakan sudah bisa bekerja sebagai wartawan saja sudah beruntung. Sebab, kepemilikan perusahaan media hanya dimiliki oleh keluarga pemodal tersebut.

3.5. Gaji Tak Pengaruhi Tolak Amplop.

Setelah mengetahui besaran gaji dan tunjangan yang diterima para jurnalis, peneliti lalu menelusuri apakah besar kecilnya gaji yang diterima seorang jurnalis akan berpengaruh pada keputusannya untuk menerima atau menolak amplop atau tidak. Sebab ada pandangan yang menyatakan bahwa gaji dan kesejahteraan wartawan yang masih minim menjadi lahan subur maraknya praktik amplop di dunia kewartawanan. Dengan gaji kecil maka wartawan akan tergoda untuk menerima pemberian dari narasumber. Dalam wawancara mendalam dengan para jurnalis menemukan bahwa jurnalis dengan gaji besar ternyata mereka masih tetap mau menerima amplop dari narasumber.

W-9 (jurnalis televisi nasional) yang rata-rata mendapatkan penghasilan Rp 7,5 juta per bulan menyatakan praktik amplop di kalangan jurnalis tidak ada kaitannya dengan besar kecilnya gaji dari perusahaan media. “Kalau soal kesejahteraan tidaklah. Bagi wartawan televisi di daerah, kerja santai saja sudah dapat gaji banyak. Misalnya, bekerja dengan target satu hari satu berita maka jika per berita Rp 250 ribu maka sudah mendapatkan Rp 7,5 juta. Kalau menurut saya, praktik amplop ini karena lebih pada kultur. Lebih pada kebiasaan hubungan antara wartawan dengan narasumber,” kata W-9.

Pernyataan W-9 diamini oleh W-7 (jurnalis cetak lokal). Menurut W-7, sikap permisif para wartawan terhadap pemberian amplop tak ada kaitannya dengan rendahnya gaji wartawan. “Kalau dihitung-hitung seperti itu ya semua akan dibilang gaji selalu kecil. Cukup dan tidakukupnya gaji tergantung

masing-masing. Tapi kalau aku, pada prinsipnya saya tidak ada target ke situ (amplop). Kalau memang ada (amplop) ya saya terima kalau tidak ada ya nggak apa-apa,” katanya.

Satu sisi ada jurnalis yang sudah mendapatkan gaji besar tapi masih mau menerima amplop tapi disisi lain ada jurnalis yang gajinya masih tergolong pas-pasan tapi dia tidak mau menerima amplop. W-2 (jurnalis cetak lokal) yang menerima gaji sebesar Rp 1,4 juta per bulan mengaku gajinya sangat pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan istrinya selama sehari-hari. Namun, karena W-2 merasa bahwa amplop memang melanggar KEJ dan tidak patut diterima maka hingga kini dirinya tetap kuat menahan godaan pemberian amplop. Saat ditanya, apakah rendahnya gaji wartawan ada hubungannya dengan maraknya praktik amplop? W-2 menjawab: “Tidak juga,” kata dia. Sebab, jika sudah menyangkut kebutuhan maka wartawan akan merasa kekurangan terus menerus. Jika seorang wartawan selalu menerima amplop maka dia sudah merasa keinginan-keinginannya akan bisa terpenuhi.

Sedangkan W-3 (jurnalis freelance) yang menerima gaji per berita Rp 250 ribu per paragraf tapi beritanya sangat sulit tayang berprinsip bahwa semua orang punya rejeki sendiri-sendiri. “Meski jumlahnya berbeda-beda. Tapi kalau ditotal bisa sama. Misalnya, saya tidak dapat fisik amplop tapi saya bisa ke luar negeri atau bisa ikut pelatihan-pelatihan yang harganya mahal,” katanya. Selama ini, W-3 memang sudah sering mengikuti pelatihan-pelatihan baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Ia berpendapat bahwa dirinya bisa berangkat

pelatihan-pelatihan itu karena lembaga-lembaga lain melihat jejak rekam seseorang yang dinilai bagus.

Sedangkan W-11 (jurnalis cetak nasional) yang menerima gaji Rp 4 juta ditambah berbagai tunjangan mengakui bahwa setidaknya besaran gaji bisa menjadi faktor pemicu seseorang menerima amplop atau tidak. Saat peneliti bertanya, kenapa Anda tak mau menerima amplop, W-11 menyatakan salah satu alasannya adalah memang gaji yang diterimanya sudah cukup. Tapi, kata dia, yang paling utama lainnya adalah menjaga idealisme. “Kadang-kadang dalam kondisi pasrahan dapat tawaran ya dalam hati bilang: wah ini lumayan juga, dapat ini dan itu. Tetapi karena saya pikir kalau saya menerima maka saya merasa seperti dipermalukan. Saya merasa dilecehkan karena ini profesi saya,” kata dia.

Dari pengalamannya di lapangan, W-11 menceritakan bahwa besaran gaji memang tidak menjadi kunci bagi seorang wartawan tidak mau menerima amplop. Sebab, ada pula wartawan yang gajinya sudah besar tapi tetap mau menerima amplop. Pada saat yang sama, ada pula wartawan yang walaupun gajinya tidak berlebih atau masih minim kondisinya tapi bisa idealis tidak mau menerima amplop. “Balik ke dirinya sendiri. Idealisme itu,” kata dia.

3.6. Pos Liputan Basah dan Pos Liputan Kering⁶

Dari 11 jurnalis yang ditemui peneliti, seluruhnya mengaku pernah mendapatkan tawaran-tawaran amplop dari narasumber. Sebagai gambaran umum, dari 11 jurnalis yang diwawancarai peneliti, sebanyak tujuh jurnalis mengaku menerima amplop. Sedangkan empat jurnalis menyatakan tidak mau menerima tawaran amplop yang diberikan narasumber. Narasumber yang memberikan tawaran amplop bisa dari berbagai macam penjuror, mulai dari perorangan, instansi pemerintah maupun instansi swasta. Pos liputan yang memberikan amplop kepada wartawan juga terbentang luas, mulai dari politik, ekonomi, hukum, pendidikan, olahraga dan lain-lain. Masing-masing jurnalis memiliki pengalaman sendiri-sendiri terkait dengan praktik amplop itu.

W-1 (wartawan televisi lokal) yang liputan di DPRD dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah menyatakan amplop yang diterimanya selalu tidak pasti. Ia menyebut nominal amplop paling kecil adalah sebesar Rp 50 ribu. Tapi, kalau dirata-rata besaran amplop yang diberikan narasumber kepada dirinya adalah antara Rp 50 ribu hingga Rp 300 ribu. W-1 mengaku amplop terbesar yang dia terima adalah sebesar Rp 1,5 juta. “Yang paling besar itu pada saat ada

⁶ Pos liputan adalah wilayah atau bidang yang akan diliput wartawan. Misalnya pos ekonomi, maka wartawan tersebut bertugas untuk meliput berita-berita ekonomi. Sedangkan pos wilayah, misalnya seorang ditugaskan di pos Semarang Barat, maka wartawan tersebut bertugas dan bertanggungjawab meliput berita-berita yang ada di Semarang Barat. Istilah lain dari pos liputan adalah beat. Menurut Potter, banyak organisasi berita menugaskan wartawan untuk meliput bidang-bidang khusus, baik dari segi geografis maupun topiknya yang dikenal sebagai “beat”. Ini istilah yang semula dipakai untuk menggambarkan jalur ronda yang tetap bagi petugas jaga atau patrol polisi (Lihat: ⁶ Deborah Potter. *Buku Pegangan Jurnalisme Independen*. BAB 7: Etika dan Hukum; halaman 58; Diterbitkan Biro Program Informasi Internasional, Departemen Luar Negeri AS, 2006).

acara *press tour* Dinas Perhubungan Jawa Tengah ke Brebes, selama tiga hari,” katanya.

W-1 menyatakan pendapatannya dari amplop memang bisa untuk menutupi berbagai kebutuhannya. Hasil amplop yang dia terima, kata dia, rata-rata satu pekan sudah sama dengan upah sebulan. “Itu kalau rajin, tapi kalau tidak ya biasanya dua minggu,” kata W-1 yang bergaji Rp 800 ribu itu. Tapi, kata dia, jika disuruh untuk memilih maka sebenarnya amplop tidak usah diterima. Sebab, kata dia, bebannya berat. “Ada narasumber minta nomor telepon. Kalau belum tayang maka mereka tanya terus “kapan mas tayange”. Mestikan jadi repot. Atau nanti malah lapor ke kantor kita yang kena SP (surat peringatan). Narasumber bisa komplain sudah diberi kok nggak tayang,” katanya.

Lalu siapa yang memberikan amplop? W-1 menjawab bahwa banyak narasumber di DPRD yang sering memberikan amplop. Mulai dari pimpinan fraksi, pimpinan komisi⁷ atau pimpinan DPRD⁸ semuanya pernah memberikan amplop. Tapi, kalau institusi resmi seperti itu maka pemberiannya pada saat ada

⁷ Komisi C DPRD Jawa Tengah menggelar rapat kerja dengan beberapa perusahaan daerah (perusda). Usai acara rapat, wartawan mewawancarai direktur perusda. Para anggota DPRD keluar dari ruang sidang dan masuk ke ruang pimpinan. Usai wawancara dengan direktur perusda, ada salah satu wartawan yang masuk ke ruang pimpinan untuk meminta wawancara. Kebetulan saat itu, pimpinan masih makan siang. Wartawan disuruh menunggu di ruang rapat. Setelah itu, pimpinan DPRD datang sehingga wawancara bisa dilakukan. Usai wawancara, pimpinan tersebut meminta agar wartawan menunggunya. Setelah itu, datang seorang staf Komisi C menyodorkan daftar hadir wartawan. Satu per satu wartawan menuliskan nama dan membubuhkan tanda tangan. Salah satu wartawan dipanggil di ruang pimpinan. Saat keluar dari ruang pimpinan, wartawan tersebut sudah membawa amplop untuk dibagi-bagi ke para wartawan. Dalam daftar hadir tertulis: “wartawan @ Rp 100.000”.

⁸ Rabu, 9 Maret 2011 pagi, Sebuah SMS tersebar di beberapa wartawan. Isinya ajakan makan-makan di Pesta Kebun, Semarang, dalam rangka ulang tahun salah satu pimpinan DPRD. Usai meliput sebuah acara rapat, wartawan lalu menuju ke Rumah Makan Pesta Kebun. Di sana mereka memesan berbagai makanan serta bernyanyi-nyanyi. Tak lupa, si empunya gawe yang ulang tahun juga membagi-bagikan amplop. Seorang informan menyebut isi amplohnya Rp 200 ribu.

agenda jumpa pers atau setelah ada rapat atau sidang-sidang.⁹ Selain itu, anggota DPRD yang atas nama perorangan juga sering memberikan amplop.¹⁰ “Kalau anggota (DPRD) kalau ketemu, ya kadang memberi,” katanya. W-1 tidak bisa memetakan siapa yang paling sering memberikan amplop kepada wartawan. “Ya nggak mesti. Ada perorangan, ada dinas-dinas,” katanya.

Sedangkan kalau amplop di Gubernuran Provinsi Jawa Tengah, kata W-1, biasanya diberikan pada saat ada acara-acara seremonial atau acara-acara konferensi pers. Biasanya, setelah acara selesai maka para wartawan menuju ke lantai 11, ruang bagian humas Provinsi Jawa Tengah. Besaran amplohnya adalah Rp 150 ribu per wartawan. Masing-masing wartawan membubuhkan tanda tangan untuk mendapatkan amplop Rp 150 ribu tersebut.¹¹

⁹ Salah satu fraksi DPRD Jateng menggelar diskusi pada Senin, 24 Januari 2011 pukul 12.00 WIB di ruang fraksinya. Usai diskusi, salah satu staf fraksi memberikan amplop-amplop kepada para wartawan secara terpisah-pisah. Amplop diberikan secara sembunyi-sembunyi tidak terbuka karena staf tersebut masih tergolong baru dalam menjalin hubungan wartawan. Staf tersebut bersalaman sambil memberikan amplop. Cara lain adalah dengan memasukan amplop ke saku wartawan. Ada sekitar 10 wartawan yang hadir di acara itu. Salah satunya adalah seorang mahasiswa yang magang di salah satu media cetak. Staf fraksi tetap memberikan amplop kepada anak mahasiswa yang magang itu.

¹⁰ Salah satu lokasi nongkrong para wartawan di DPRD adalah di lantai III Gedung DPRD. Sebab, di lantai ini ada ruang komisi DPRD sehingga banyak anggota DPRD berseliweran. Pada Kamis, 6 Januari 2011 sekitar pukul 09.05, ada seorang anggota DPRD yang keluar dari ruang komisi E. Anggota DPRD tersebut menyapa dan menyalami wartawan. Para wartawan tidak menyalami kesempatan untuk mewawancarai anggota tersebut. Materi wawancara diantaranya soal penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Usai wawancara, anggota DPRD tersebut duduk dan membuka tas yang dibawanya. Dia mengambil uang dari tasnya untuk ditaruh di samping kursi. Ia lalu memanggil salah satu wartawan yang ada didepanya. DPRD tersebut meminta agar wartawan mengambil uang yang ditaruh di kursi tersebut. Tak lupa, DPRD tersebut berbisik pada pengambil uang bernominal Rp 100 ribuan. “Ini, dibagi satu-satu ya,” kata anggota DPRD. Wartawan yang mengambil uang pun mengangguk. Setelah itu, anggota DPRD meninggalkan wartawan yang jumlahnya empat. Wartawan pengambil uang tersebut langsung menghambiri wartawan lainnya untuk memberikan uang.

¹¹ Pada Kamis (17/2/2011), Provinsi Jateng menggelar rapat koordinasi pengendalian wilayah di Gradhika Jawa Tengah. Usai acara, salah satu pegawai kehumasan Provinsi Jateng meminta kepada para wartawan untuk ke lantai 11. Lantai 11 adalah ruang kantor BIKK Jawa Tengah. Setelah acara selesai, para wartawan masih saling mengobrol di ruangan konferensi pers. Sesaat kemudian, mereka menuju ke lantai 11. Disana sudah siap seorang staf yang membawa kertas berisi daftar hadir dan amplop. Satu per satu para wartawan tanda tangan dan

W-2 (wartawan cetak lokal) juga menyatakan tawaran amplop dari narasumber sangat sering. Bentuknya berbagai macam, mulai dari uang, pulsa dan barang-barang lain. Biasanya imbalan itu diberikan pada saat ada liputan acara seremonial, di mana yang menggelar acara meminta agar acaranya diberitakan. Selain itu imbalan juga diberikan ketika ada liputan di kasus-kasus penyelewengan atau kasus sengketa. Jika ada ketidakberesan maka narasumber ingin agar tidak diberitakan wartawan.¹²

Bahasa yang digunakan untuk memberikan amplop kepada para wartawan sangat bermacam-macam, mulai dari ini untuk membeli bensin, membeli pulsa dan lain-lain. Bahkan, kata W-2, ada pula yang menyatakan, “Ini Mas jangan dimuat ya, saya hanya memberikan segini”. Pemberian yang pesannya meminta agar beritanya tidak dimuat biasanya yang terkait dengan kasus-kasus penyelewengan.

W-2 menambahkan, berdasarkan yang diceritakan teman-temannya, nominal amplop wartawan sangat bermacam-macam, mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 500 ribu. Bahkan, kata dia, khabarnya ada perusahaan yang memberikan hingga Rp 1 juta seperti di PT.....¹³ “Makanya setiap PT ada acara maka banyak sekali wartawan yang datang ke sana,” kata wartawan

menerima amplop. Besaran amplop untuk wartawan dari lantai 11 adalah Rp 150 ribu per orang.

¹² Jum'at, 11 Maret 2011, di salah satu koran di Jawa Tengah ada berita PJTKI yang menelantarkan TKI. Berita tersebut dibuat wartawan di luar Semarang dan hanya tayang di salah satu media di Jawa Tengah. PJTKI merasa terganggu karena seolah terpojokan di dalam berita karena dituding menelantarkan TKI. PJTKI tersebut lalu mengundang wartawan untuk mengklarifikasi berita tersebut. Datanglah empat wartawan ke Rumah Makan Nusantara, Semarang, untuk bertemu dengan narasumber dari PJTKI. PJTKI membantah adanya penelantaran TKI seperti yang diungkap salah satu korban dari TKI. Setelah makan selesai, pengurus PJTKI tersebut memberikan amplop ke wartawan. Seorang wartawan memperlihatkan ke peneliti isi amploinya sebesar Rp 500 ribu.

¹³ Informan menyebutkan nama salah satu perusahaan besar di Semarang.

yang menolak pemberian amplop ini. Para narasumber yang memberikan amplop ada yang sukarela tapi ada pula yang terpaksa. “Sukarela itu biasanya alasan buat bensin atau wartawan sudah dianggap sebagai teman dekat. Yang terpaksa biasanya dia diminta amplop wartawan,” katanya.

Sementara W-3 (jurnalis freelance) yang sebelumnya pernah bekerja di media cetak lokal menyatakan ada perbedaan antara tawaran amplop pada saat dirinya bekerja di media cetak lokal dibandingkan dengan saat bekerja di medianya saat ini. “Kalau media saya saat ini kurang dikenal disini (Semarang) maka jarang narasumber memberikan amplop. Kalau di perusahaan yang dulu karena sudah dikenal maka sangat sering menerima tawaran amplop,” katanya. Selama ini, kata W-3, pemberian amplop ke wartawan sangat beragam. Di institusi terutama ada wartawan pokja (kelompok kerja), misalnya di ekonomi yang punya pokja di beberapa tempat liputan. Biasanya diserahkan ke satu wartawan yang dipercaya lalu dibagi-bagi. Tapi kalau sistemnya insidental biasanya yang mengelola humas. “Atau kalau wawancara langsung ketemu biasanya langsung memberi dengan dalih untuk tali persaudaraan,” katanya.

Tapi, kata W-3, saat ini juga ada trend pergeseran pemberian amplop. Ada model baru terutama di beberapa BUMN lebih suka sistem gaji bulanan. Ada beberapa BUMN mereka menawarkan sistem amplop bulanan untuk membayar beberapa artikel. Artikel (berita) mengenai perusahaan tersebut yang sudah dimuat diklaim oleh wartawan di BUMN tersebut. Harganya tergantung panjang pendeknya artikel. Berita itu bukanlah advertorial. Sebab, kata dia, perusahaan tidak mau memakai advertorial terlalu sering karena advertorial

memiliki kelemahan, sumber dan konten beritanya tidak bisa langsung dipercaya oleh pembaca. “Advertorial-kan iklan yang tingkat kepercayaan publiknya masih rendah,” katanya.

Sementara itu, W-4 (wartawan radio) yang meliput di bidang ekonomi menyatakan besaran amplop yang diterimanya kebanyakan dari pihak instansi atau perusahaan swasta. Nominalnya rata-rata antara Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. “Paling sedikit ya Rp 100 ribu,” katanya. W-4 mengaku pernah mendapatkan amplop Rp 500 ribu pada saat ada acara luar kota, berupa *pers gatering*. Biasanya, kata W-4, yang memberikan amplop itu adalah bagian petugas atau pegawai humas. Tapi, alumnus jurusan Komunikasi di salah satu perguruan tinggi Semarang ini mengaku pernah mendapatkan pengalaman yang tidak pernah dilupakan. Dimana, yang memberikan amplop adalah langsung kepala dinas di Provinsi Jawa Tengah. “Pas selesai acara, kami mau pulang, tiba-tiba kepala dinas itu memanggil. Dia merogoh saku lalu memberikan uang kepada wartawan. Uangnya *fresh money* tanpa dibungkus dengan amplop. Saat itu, teman-teman juga pada tertawa,” katanya.¹⁴

W-4 merasakan adanya perbedaan antara wartawan radio, cetak dan elektronik dalam pemberian amplop dari narasumber. Perbedaan tersebut menyangkut soal jatah nominal amplop. “Biasanya paling tinggi koran dan

¹⁴ Seorang kepala dinas provinsi Jawa Tengah juga memberikan amplop sendiri. Sebuah undangan makan-makan untuk wartawan datang dari salah satu kantor dinas di Provinsi Jawa Tengah. Acara digelar usai sholat jumatun pada 4 Maret 2011. Sekitar 15 wartawan datang ke kantor dinas tersebut. Usai manyantap makanan, barulah kepala dinasnya mengobrol dengan wartawan di sebuah ruangan rapat. Materi pembicaraannya seputar kinerja dinas di bidangnya. Usai wawancara, kepala dinas tersebut lalu menuju ke ruang lain. Ia mengambil beberapa amplop yang sudah disiapkan. Kepala dinas kembali ke ruang rapat dengan membawa amplop. Lalu, kepala dinas tersebut membagi-bagikan amplop sendiri ke para wartawan satu per satu. Seorang informan menyatakan isi amploinya Rp 200 ribu.

televisi. Kalau radio paling buncit,” katanya. Berapa bedanya? W-4 menjawab: ”Ya antara Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu. Biasanya kalau saya menerima ada tulisan amplop untuk radio. Tapi kadang juga ada yang disamakan”. Selain memberikan amplop, biasanya perusahaan-perusahaan itu juga memberikan makan siang, souvenir hingga voucher. Bahkan, kata W-4, ada kecenderungan perusahaan juga memberikan barang-barang yang nominalnya tinggi, seperti handphone dan flas dish. Namun, biasanya itu tidak semua wartawan mendapatkannya. Sebab, biasanya setelah ada acara maka souvenir berharga tersebut diundi. Bagi wartawan yang beruntung maka akan mendapatkan hadiah tersebut.

Sementara itu, W-5 (koresponden cetak nasional) yang tidak mau menerima amplop menyatakan tawaran amplop dari narasumber kepada wartawan sangat sering sekali. Disemua bidang liputan hampir seluruhnya pernah memberikan tawaran amplop kepada wartawan. Parahnya lagi, kata dia, jika ada wartawan yang tidak mau menerima amplop, justru narasumber atau pegawai humasnya memaksa-maksa wartawan tersebut untuk menerima amplop. “Narasumber seringkali memaksa wartawan untuk menerima amplop,” katanya.

W-6, (wartawan televisi lokal) yang sebelumnya liputan di politik lalu pindah ke kriminal menyatakan persoalan besar kecilnya amplop memang tergantung wartawannya. Ia mengakui bahwa antara pos liputan di politik lebih sering ada tawaran amplop dibandingkan di pos liputan kriminal. “Tawaran amplop di kriminal sangat jarang. Banyak di *beat* politik,” katanya. Di *beat*

kriminal, rata-rata yang memberi amplop siapa? W-6 menjawab: “Ya jarang. Paling hanya digunakan untuk kirim pulsa, makan atau rokok,” katanya. Padahal, kata dia, kalau di politik pemberi amplop sangat beragam, mulai dari anggota, pimpinan komisi,¹⁵ fraksi sampai pimpinan DPRD.

Rata-rata, W-6 mengaku liputan di pos kriminal per bulan hanya mendapatkan amplop sekitar Rp 1 juta. Nominal itu setengahnya lebih pada saat dirinya meliput di bagian politik dengan pos liputan di DPRD dan Provinsi Jawa Tengah. Saat liputan di kriminal juga habis untuk kebutuhan di jalan karena liputannya sangat *mobile* sehingga butuh makan, minum dan lain-lain. Ada pula, narasumber di bidang kriminal yang hanya memberikan uang untuk makan para wartawan. “Misalnya dikasih Rp 200 ribu nanti dipakai makan bareng-bareng (bersama-sama),” kata W-6.

W-6 mengaku pernah menerima amplop paling kecil adalah sebesar Rp 10 ribu. “Narasumber memberikan Rp 20 ribu. Karena ada dua wartawan maka (Rp 10 ribu itu) dibagi dua. Itu uang dari anggota DPRD Jawa Tengah,” katanya. Sedangkan rata-rata besaran amplop yang diterima W-6 adalah antara Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu. W-6 juga mengakui bahwa ada perbedaan besaran amplop antara wartawan cetak dan televisi. “Perbedaannya sekitar

¹⁵ Salah satu komisi di DPRD Jawa Tengah menggelar acara rapat kerja dengan beberapa dinas. Usai acara, wartawan mewawancarai salah satu pimpinan komisi DPRD Jawa Tengah. Wawancara dilakukan secara santai sambil ngobrol-ngobrol sehingga waktunya agak lama. Karena sudah selesai wawancara, salah satu wartawan hendak pulang duluan. Namun, pimpinan komisi DPRD tersebut meminta agar wartawan jangan pulang dulu. Para wartawan dengan pimpinan Komisi tersebut melanjutkan ngobrol-ngobrol lagi. Sekitar lima menit kemudian, pimpinan komisi tersebut membuka amplop yang ada di sorogan di bawah meja. Sebelumnya, seorang pegawai Komisi D memberikan dua amplop dan menaruhnya di sorogan meja milik pimpinan tersebut. Pimpinan itu lalu membuka amplop itu memberikan kepada salah satu wartawan. “Ini ya bagi satu-satu,” katanya. Saat itu, ada tujuh wartawan. Setelah itu, para wartawan pamit. Salah satu wartawan yang bertugas membagi-bagi memberikan uang Rp 100 ribuan kepada teman-temannya.

separo atau dua kali lipatnya. Misalnya cetak Rp 200 ribu, televisi lokal Rp 100 ribu dan televisi nasional bisa sampai Rp 300 ribu,” katanya.

W-7 (wartawan cetak lokal) yang bertugas di Balai Kota Semarang menyatakan amplop berasal dari perorangan dan instansi pemerintahan. Namun, nominal dan pemberiannya selalu tidak pasti. Biasanya, amplop diberikan setiap ada apa? W-7 menyatakan, “Kalau perorangan nggak menentu. *Sak pawehe* (terserah memberi atau tidak). Kalau di instansi ya tergantung moment acara. Kalau di DPRD (Semarang) ada moment nggak ada amploponya karena di DPRD Kota Semarang nggak ada humasnya. Adapun besaran amplop rata-rata adalah Rp 200 ribu”. Sedangkan kalau pemberian dari instansi, W-7 mengungkapkan besarnya juga pada kisaran Rp 200 ribu. Paling kecil Rp 150 ribu dan paling besar Rp 500 ribu.

Adapun intensitas penerimaan amplop juga tidak pasti. W-7 menyatakan pernah juga dirinya selama satu bulan tidak mendapatkan amplop sama sekali. Tapi, kata dia, pernah ada yang satu pekan mendapatkan amplop lebih dari dua kali. “Paling *sepele* ya satu pekan sekali,” katanya. W-7 mengakui bahwa peredaran amplop wartawan di Balai Kota Semarang masih kalah jauh jika dibandingkan di pos liputan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. “Harus diakui yang sangat basah di Pemprov (Jawa Tengah),” katanya. Menurut W-7 hal itu karena anggaran di Provinsi lebih besar dibandingkan di Balai Kota Semarang. W-7 menambahkan, kesempatan wartawan di Balai Kota Semarang yang paling sering mendapatkan amplop adalah wartawan cetak. Selama ini, kata dia, di

Balaikota Semarang yang paling banyak amplopnya adalah wartawan cetak. Sebab, kata dia, frame masyarakat masih mengenal cetak daripada elektronik.

Sementara itu, W-8 (wartawan *online*) yang meliput di pos pendidikan menyatakan hampir semua instansi pendidikan pernah memberikan amplop ke wartawan. “Saya tidak bilang sering *lho* atau selalu, tapi hampir semua pernah. Itu kan kebijakan masing-masing Perguruan Tinggi. Mungkin kalau ada anggarannya ya memberi,” katanya. W-8 menambahkan bahwa pemberian amplop itu memang tidak pasti. Sepengetahuan W-8, perguruan tinggi akan membagi-bagikan amplop ke wartawan misalnya ketika ada acara seminar dan acara lain yang skala acaranya besar sehingga mereka menyediakan anggaran publikasi. Tapi kalau acara-acara yang bersifat wawancara biasa, ya tidak. Acara yang membagi amplop di lembaga pendidikan misalnya pada saat ada acara pengukuhan guru besar (profesor). Besaran amplopnya pun bervariasi.¹⁶

Di salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang, misalnya, nominal amplop yang diberikan kepada wartawan adalah Rp 150 ribu per wartawan. Selama ini, kata W-8, meski banyak lembaga pendidikan di Semarang tapi undangan untuk wartawannya sangat jarang. “Tidak seperti di bidang ekonomi. Seseringnya undangan liputan di pendidikan ya mungkin sepinya undangan liputan di ekonomi,” katanya.

Adapun W-10 (wartawan cetak lokal) yang meliput di bidang politik menyatakan pos paling basah amplopnya adalah di pemerintahan provinsi, serta

¹⁶ Jum’at, 18 Maret 2011, sebuah perguruan tinggi di Semarang mengundang acara konferensi pers dengan agenda pengukuhan tiga guru besar. Usai acara konferensi pers, para wartawan diminta untuk tanda tangan satu per satu. Setelah tanda tangan dilakukan, seorang pegawai perguruan tinggi tersebut memberikan amplop kepada para wartawan satu per satu.

lembaga politik atau politikus. “Banyak sekali tawaran amplop, kadang nggak diminta pun *moro* (datang),” katanya. Rata-rata, pemberian amplop paling banyak adalah dari pribadi para politikus dan partai politik di Jawa Tengah.¹⁷ Menurutnya, ada tingkatan-tingkatan paling basah dan paling kering soal amplop? “Kalau menurutku, tingkatan paling bawah adalah seni budaya dan hiburan yang jarang sekali ada amplopnya. Tingkat selanjutnya adalah pengadilan, terus kriminal. Setelah itu yang paling basah amplopnya adalah pos yang berhubungan dengan pemerintahan dan politik. Yang terakhir ini sangat-sangat basah,” kata W-10 yang belum pernah liputan di pos ekonomi ini.

Berapa besaran amplop yang diterima? “Ya nggak mesti,” kata W-10. Paling kecil? Rp 100 ribu. Sedangkan paling besar, W-10 mengaku pernah menerima amplop sebesar Rp 2,5 juta dari salah satu pejabat di Jawa Tengah.

¹⁷ Salah satu acara yang ditunggu-tunggu para wartawan adalah acara/kegiatan yang digelar partai politik. Sebab, partai politik merupakan salah satu institusi yang sering membagikan uang kepada wartawan, apalagi jika ada hajat atau momentum politik. Misalnya kegiatan sebuah partai politik di Jawa Tengah berikut ini. Satu hari menjelang pelaksanaan musyawarah wilayah sebuah partai di Jateng, para calon ketua terus berkonsolidasi. Salah satu kandidat mengundang para wartawan di Warung Soto Pak Man, Mugas Semarang. Konferensi pers digelar pagi-pagi, tepatnya pukul 08.00 WIB. Kandidat tersebut didampingi beberapa anggota tim sukses. Sebelum acara konferensi pers selesai, salah satu tim sukses juga bagi-bagi amplop. Pada hari yang sama, pukul 15.00 WIB, kandidat ketua lainnya juga menggelar pertemuan dengan wartawan di lantai 10 Grand Candi Semarang. Pada saat wartawan hendak pulang, salah satu tim sukses calon tersebut mengantar hingga ke lobi hotel. Saat itulah orang tersebut memberikan amplop kepada para wartawan. Keesokan harinya, salah satu informan menyebut isi amplopnya sebesar Rp 500 ribu.

Pada 26 Pebruari 2011, pukul 10.00 WIB, acara musyawarah wilayah partai tersebut dibuka. Banyak peserta muswil dan tamu undangan yang sudah hadir di acara yang digelar di Hotel Patrajasa Semarang itu. Di sebelah aula yang digunakan untuk acara pembukaan, ada ruang untuk menyajikan makanan. Ada beberapa kursi yang digunakan. Disinilah ada beberapa wartawan yang duduk-duduk. Salah satu panitia, membagi-bagi amplop kepada wartawan. Peneliti melihat memberikan amplop kepada para wartawan di saat acara sambutan-sambutan pembukaan masih berlangsung. Acara sudah selesai, para tamu undangan dan wartawan ramai-ramai makan dan minum. Saat itulah, tiba-tiba ada salah satu wartawan menghampiri saya untuk memberikan amplop. Dia menyalami saya dengan membawa sebuah amplop. “Ini titipan dari Pak.....,” katanya. Saya bilang: “Ga usah, saya ga usah pak. Santai saja”. Ia pun sepertinya memahami dengan berkata: “Aku udah tahu kalau kamu ngak mau, tapi saya dititipi ya saya sampaikan”.

Padahal, kata dia, amplop tersebut diberikan pada saat wawancara biasa. “Dia lagi terpilih memimpin sebuah organisasi. Yang memberikan ya langsung yang bersangkutan. Saya telpon ingin wawancara terus disuruh ke rumahnya. Saya niatnya hanya wawancara, tapi saat mau pulang, sampai parkiran (tempat parkir) motor, saya dipanggil lalu dikasih amplop,” kenang W-10 sambil tersenyum. W-10 juga pernah menerima amplop sebesar Rp 2 juta dari salah satu terdakwa kasus. Adapun kalau dirata-rata, W-10 menyatakan besaran amplop yang diterimanya pada saat meliput di pos politik berkisar antara Rp 100-300 ribu. “Rp 50 ribu ya pernah, tapi sangat jarang. Kisarannya ya Rp 100 ribu-Rp 300 ribu,” katanya. Sedangkan kalau dari institusi di Gubernuran Provinsi Jawa Tengah nominal isi amploponya adalah Rp 150 ribu. W-10 mengaku setiap bulan rata-rata pendapatannya dari amplop adalah sekitar Rp 3 juta.

W-10 juga pernah bertugas di liputan bidang hukum. Di bidang ini, kata dia, pemberian amplop kepada para kuli tinta juga sering sekali. Misalnya dari para tersangka yang diberikan melewati pengacaranya. Nominal amplop pun tidak mesti. “Paling ngasih Rp 100 ribu hingga Rp 300 ribu,” katanya. Pemberian amplop juga datang dari lembaga penegak hokum. Misalnya pada saat acara seremonial atau peringatan hari besar atau pada saat lembaga penegak hukum berkepentingan untuk melakukan publikasi suatu perkara.

Berapa besarnya? W-10 menyatakan salah satu humas di lembaga penegak hukum di Semarang juga pernah memberikan amplop kepada wartawan sebesar Rp 500 ribu. Apakah penerimaan amplop itu ada

tandatanganinya atau tidak? W-10 menyatakan kebanyakan tidak. Apalagi kalau amplop yang diberikan dari orang-perorangan. “Kecuali kalau di lembaga pemerintah atau kehumasan, biasanya harus tanda tangan dulu,” katanya. Jika di lembaga negara maka penerimaan amplop wartawan melalui tanda tangan kwitansi.¹⁸

W-9 (wartawan televisi nasional) yang sudah berprofesi sebagai wartawan sejak tahun 1998 menyatakan, akhir-akhir ini seperti ada pergeseran pemberian amplop. Jika dulu hampir semua instansi atau narasumber menyediakan uang transport bagi wartawan tapi saat ini jumlah institusi atau lembaga yang memberi itu menyusut. “Secara nominal juga menyusut,” kata dia. Saat ini, yang masih sering memberikan adalah di lembaga-lembaga politik, para politikus, lembaga pemerintahan, serta kepolisian. W-9 mencontohkan, dulu lembaga kepolisian adalah salah satu institusi yang hampir tiap ada acara akan selalu mengundang wartawan dan pasti memberikan amplop ke wartawan. Tidak hanya cetak tapi juga televisi. “Tapi kondisinya sekarang sudah beda. Sekarang jarang lembaga atau instansi yang memberi,” katanya.

¹⁸ Pada saat ada acara syukuran dan pisah sambut anggota sebuah komisi di Jawa Tengah, beberapa wartawan diundang dalam acara tersebut. Acara digelar Senin, 17 Januari 2011 pukul 11.00-an WIB di kantor komisi. Saya tak diundang tapi nekat datang. Setelah acara sambutan selesai, lalu dilanjutkan dengan acara konferensi pers anggota komisi yang baru. Setelah acara konferensi pers itulah, salah satu pegawai di komisi berseragam baju pegawai negeri sipil memegang mik untuk mengumumkan info kepada para wartawan. “Bagi wartawan yang saya panggil harap menghadap saya,” kata dia. Pegawai tersebut lalu menyebut satu per satu wartawan dengan berdasarkan pada catatan yang dia bawa. Karena tidak masuk undangan, nama saya tidak termasuk yang dipanggil. Secara bergantian, para wartawan menghampiri meja pegawai negeri tersebut. Pegawai tersebut meminta penerima amplop tanda tangan di dua kertas. Satu kertas list dan satunya lagi secarik kertas seperti kwitansi bukti penerimaan.

W-9 menyatakan banyak penyebab yang menjadi variabel kenapa sebuah instansi atau lembaga tidak memberikan amplop kepada wartawan. Misalnya, kata W-9, di institusi Kepolisian Daerah Jawa Tengah dulu banyak judi toto gelap (togel) sehingga peredaran uang di lembaga penegak hukum itu sangat banyak. Saat ini, kata dia, judi sangat jarang atau bahkan tidak ada. “Padahal, judi ini juga ada kaitannya dengan amplop wartawan. Artinya, kalau ada judi beredar maka peredaran uang juga banyak sehingga sangat memungkinkan uang itu juga dipakai untuk bagi-bagi amplop ke wartawan,” kata dia.¹⁹

Selain itu, kata dia, para narasumber sudah mulai tahu bahwa jika sudah memberikan berita maka itu artinya sama saja sudah memberikan uang kepada wartawan. Karena jika beritanya tayang maka wartawan akan mendapatkan honor dari perusahaannya. Atas dasar itu maka pimpinan lembaga mungkin berpikir tidak perlu memberikan amplop.

Selain itu, kata W-9, para narasumber juga sudah mulai mengetahui bahwa jika memberikan amplop ke wartawan televisi tidak akan bisa mulus ditayangkan. Sebab, kebanyakan isu atau berita yang diangkat televisi adalah berita kejadian. “Kalau berita wawancara ya susah naik. Kecil kemungkinan tayang,” katanya. Berita-berita jumpa pers di daerah yang biasanya membagi-bagi amplop sangat sulit naik di televisi nasional.

W-9 melihat ada pergeseran pemberian amplop di kalangan wartawan. “Kalau dulu dikasih ke wartawan langsung tapi sekarang untuk fasilitasi

¹⁹ Lihat: “Kongsi Bisnis Wartawan dan Mafia Judi” dalam *Majalah Independen* edisi: 10 Tahun ke-7/Oktober 2001; Aliansi Jurnalis Independen; 2001.

organisasi-organisasi wartawan. Ada perubahan pola. Artinya duit sama-sama lari ke wartawan tapi caranya lain,” kata dia. Misalnya dana diberikan ke organisasi wartawan untuk pelaksanaan kegiatan. Saat ini, kata W-9, dalam sebulan humas belum tentu mengundang wartawan. Tapi sekarang banyak organisasi wartawan yang menjamur. Di satu tempat saja bisa sampai ada dua organisasi wartawan.²⁰ Mungkin itu jalan tengah. “Mungkin kedoknya program pemberdayaan wartawan. Dana organisasi wartawan adalah hibah. Pejabat meminta agar wartawan mengajukan proposal kegiatan,” katanya.²¹

Soal besaran amplop? W-9 menyatakan memang tidak pasti. Yang jelas, kata dia, kalau sekarang ada narasumber yang memberikan Rp 50 ribu. “Padahal, dulu nggak ada. Mending nggak ngasih. Dulu jumlah media juga belum banyak,” katanya. Menurut W-9, yang paling sering memberikan amplop adalah lembaga politik. “Teman-teman sudah tahu kalau politik sering ngasih amplop. Misalnya jika ada acara salah satu partai maka partai memberikan Rp 200 ribu,” katanya.²² Adapun yang tidak pernah memberikan amplop, kata W-9

²⁰ Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2011, sejumlah organisasi wartawan mendapatkan kucuran dana dari Provinsi Jawa Tengah dengan nilai keseluruhan Rp 2,01 miliar. Nama bantuan dana tersebut terdapat dalam pos hibah. Dana hibah Rp 2,01 milyar di antaranya diberikan kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah sebesar Rp 400 juta, Masyarakat dan Wartawan Pemantau Pemilu (Mapilu) atau lembaga di bawah PWI sebesar Rp 261,4 juta, Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Semarang Rp 350 juta, Jurnalis Televisi Rp 50 juta dan lain-lain. Sisanya dikucurkan untuk berbagai organisasi wartawan lainnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah maupun DPRD Jawa Tengah. Dana hibah untuk organisasi wartawan tersebut bagian dari pos hibah yang dikucurkan Provinsi Jawa Tengah yang nilai seluruhnya dalam APBD 2011 adalah Rp 10, 3 miliar. Dana hibah lain dikucurkan untuk *Stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI)* dan *Radio Republik Indonesia (RRI)* mendapatkan bagian masing-masing Rp 400 juta dan Rp 200. Sedangkan Kodim IV Diponegoro dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah masing-masing mendapatkan dana hibah Rp 1,5 miliar. Lihat: “Kucuran Dana Rp 2 Miliar untuk Wartawan Dikecam”, *TempoInteraktif*, Edisi 21 Oktober 2010.

²¹ Lihat: “Pemberian Dana ke Wartawan, Tradisi Lama” *TempoInteraktif* Edisi Jum'at, 22 Ootktober 2010.

²² Lima hari menjelang pelaksanaan musyawarah wilayah sebuah partai di Jawa Tengah,

adalah LSM (lembaga swadaya masyarakat). Tapi, LSM yang benar-benar memperjuangkan rakyat. Sebab, saat ini banyak sekali LSM yang bermain proyek sehingga dalam berhubungan dengan wartawan ada yang membagi-bagi amplop.

W-11 (wartawan cetak nasional) yang tidak mau menerima amplop menyatakan tawaran amplop bisa berasal dari mana saja, terutama instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang memang ada anggaran khusus untuk wartawan. “Mereka sering sekali menawari amplop. Pribadi-pribadi juga banyak. Ada pula amplop yang diberikan untuk menutup kasus-kasus tertentu. Misalnya lagi mengangkat isu sensitif ditawari amplop dalam jumlah besar. Kalau yang begini, ada tujuannya supaya beritanya ga di-*blow up* lagi,” katanya. Selain itu, perusahaan-perusahaan swasta juga sering memberi tawaran amplop karena perusahaan-perusahaan itu ingin sekalian beriklan. “Kampus-kampus juga ada yang memberikan karena menyediakan dana seperti itu,” kata dia. Sedangkan yang tidak pernah, kata W-11, “Mungkin LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang nggak pernah”.

Meski W-11 tidak mau menerima amplop, tapi kecenderungannya banyak narasumber yang sering memaksa dirinya untuk menerima amplop. “Ada yang memaksa, *pokomen* (pokoknya) harus diterima,” katanya. Jika tidak

ketua panitia musyawarah mengundang para wartawan untuk konferensi pers. Acara konferensi pers digelar pada Selasa (22 Februari 2011) di lantai V Gedung DPRD Jawa Tengah, tepatnya di ruang fraksi partai yang akan menggelar musyawarah tersebut. Ketua panitia musyawarah menjelaskan tentang persiapan pelaksanaan muswil. Usai tanya jawab, salah satu staf yang duduk disebelah ketua panitia beranjak dari tempat duduknya. Dia mengambil amplop. Lalu dia keliling ke kursi wartawan yang duduk melingkar di meja rapat. Satu per satu, staf tersebut memberikan amplop ke masing-masing wartawan. Ketua panitia itupun menyatakan bahwa isi amplop masih sedikit. “Itu hanya untuk uang bensin. Nanti kalau pas hari H (pelaksanaan musyawarah) saya tambahi ya,” kata ketua panitia tersebut.

bisa ditolak atau kadang karena bersama dengan teman-teman yang lain maka W-11 terpaksa harus menerima amplop itu. “Takut nggak enak,” katanya. Tapi, tambah dia, nanti amplop itu dikasihkan ke kantor. Kantorlah yang akan mengembalikan uang amplop tersebut kepada pemberinya. Tapi W-11 menyatakan seperti itu jarang sekali. “Kalau bisa ya saya langsung tolak waktu di lapangan,” katanya.

Berapa besaran tawaran yang diberikan? W-11 menyatakan besaran amplop selalu tidak pasti. “Rata-rata sih sekitar Rp 500 ribu. Ada yang sampai Rp 1 juta. Ada pula yang sempat menyodorkan kwitansi dengan jumlah yang sangat besar,” katanya. Biasanya, kata W-11, dalam menolak pemberian amplop itu dirinya memakai bahasa halus tanpa menyinggung si pemberi amplop. “Saya bilang: Saya nggak bisa menerima ini. Terima kasih tapi saya nggak bisa menerima. Kalau dipaksa-paksa terus ya, saya bilang: nanti kalau saya menerima maka nggak bisa meliput lagi. Sebab, saya akan dipecat dari perusahaan,” ujarnya.

W-11 menyatakan bahwa masalah amplop di kalangan wartawan memang sesuatu yang sangat kompleks. Faktornya antara lain adalah ada pada diri masing-masing wartawan. Banyak sekali wartawan yang bekerja tidak karena lagi idealis tapi untuk mencari uang. Kemudian ditambah lagi *reward* dari perusahaan medianya dianggap masih kurang sehingga akhirnya dengan mudah ketika diberi amplop pihak lain maka dengan mudah diterima. Bahkan, kata W-11, ada yang meminta amplop. “Tapi yang meminta seperti itu agak sedikit,” katanya. Disisi lain, faktor pemberi atau narasumber yang selalu

memberikan amplop ke wartawan. "Saya sering ditanyai narasumber atau humas perusahaan mengenai apa kira-kira yang harus diberikan kepada wartawan jika mengundang wartawan," kata W-11. Sepertinya, kata W-11, sudah terbentuk anggapan pihak-pihak perusahaan kalau mau memberi informasi atau mengundang wartawan ya harus memberikan amplop ke wartawan. "Sehingga ini seperti lingkaran setan, karena banyak faktor. Yang mana duluan, apakah wartawan duluan, narasumber atau perusahaan media saya tidak tahu," kata W-11.

Menurut pengalaman W-11 yang sudah bertugas di berbagai daerah, praktik amplop di Semarang memang yang paling parah. Pemberian amplop di kota lain tidak seterbuka seperti yang terjadi di Semarang. "Kalau pun di kota lain ada, tapi ya sama-sama tahu. Kalau di Semarang benar-benar vulgar. Jika ada acara maka wartawan intinya meminta. Cukup buat riskan kok profesi wartawan kayak gini," kata W-11.

Seharusnya, kata W-11, perusahaan memperketat aturan larangan wartawan menerima amplop tapi pada saat yang sama wartawan harus diberi gaji yang memadai. Selain itu, wartawannya juga harus benar-benar menjaga idealismenya. Sebab, kata W-11, ada pula wartawan yang gajinya sudah besar tapi tetap mau menerima amplop. Tapi, ada pula wartawan yang walaupun gajinya tidak berlebih atau masih minim kondisinya tapi bisa idealis. "Balik ke dirinya sendiri. Itu masalah idealisme," katanya.

3.7. Amplop dan Obyektifitas Berita.

Sebagian jurnalis di Kota Semarang sepertinya sudah terbiasa menerima amplop dari narasumber. Tidak adanya pengawasan dan sanksi yang tegas dari perusahaan media menjadikan praktik amplop semakin marak. Persoalan yang tak kalah penting adalah soal perbedaan cara pandang para jurnalis mengenai amplop, terutama terkait dengan apakah penerimaan amplop ada kaitannya dengan independensi wartawan dan obyektifitas pemberitaan ataukah tidak? Jawaban jurnalis di Semarang sangat beragam dalam menjawab persoalan ini. Namun, jika dipilah maka ada dua pandangan. *Pertama:* jurnalis yang menganggap bahwa jika menerima amplop maka tidak akan bisa lagi independen dan obyektif dalam membuat materi berita. *Kedua:* jurnalis yang menganggap bahwa meski dirinya menerima amplop dari narasumber tapi masih tetap merasa bisa independen dan obyektif dalam membuat berita.

3.7.1 Terima Amplop = Tidak Bisa Obyektif

W-1 (jurnalis televisi lokal) mengakui bahwa ketika sudah meliput di lapangan maka dirinya bebas menerima amplop dari narasumber. Sebab, kontrol dari perusahaan medianya sangat minim. Namun, kata dia, dirinya merasa terbebani jika sudah menerima amplop dari narasumber. Wartawan yang mau menerima amplop ini mencontohkan, jika ada narasumber yang memberikan amplop maka narasumber tersebut sangat berharap agar beritanya ditayangkan. Menjadi masalah jika sudah diberi amplop tapi ternyata berita tersebut tidak ditayangkan. “Sebab, kalau berita tidak tayang bisa dikomplain narasumber. Kita yang enggak enak sendiri,” katanya.

Untuk itu, W-1 menegaskan, jika disuruh memilih maka sebenarnya dirinya lebih baik tidak menerima amplop dari narasumber. “Mending sebenarnya nggak usah diambil. Karena bebannya berat. Ada narasumber minta nomor telepon. Kalau belum tayang maka mereka nanya terus “Kapan mas tayange”. Mestikan jadi repot. Atau nanti malah lapor ke kantor, kita yang kena SP (surat peringatan). Narasumber bisa komplain, sudah diberi kok nggak tayang,” katanya. Bahkan, kata W-1, ada narasumber yang enggan memberikan amplop ke wartawan sebelum beritanya ditayangkan. “Ada pula yang memberikan tapi ada syarat tayang dulu, baru dikasih (amplop),” katanya. Caranya, setelah sebuah berita tayang maka wartawan melaporkan bahwa beritanya sudah ditayangkan. Bisa saja, wartawan itu memberikan rekaman beritanya. Setelah itu, narasumber baru mau memberikan amplop kepada wartawan.

Adanya beban jika sudah menerima amplop tersebut diamini W-2 (wartawan cetak lokal). “Jika menerima amplop maka jelas akan sangat terbebani. Makanya risiko mau menerima amplop ya besar. Bukan hanya diintervensi soal isi berita tapi juga akan terbebani untuk memuat berita. Biasanya mereka berkata: saya sudah dikasih duit ya saya buat berita sebaik-baiknya,” katanya. W-3 (jurnalis freelance) juga menyakinkan bahwa amplop mendorong wartawan tidak bisa obyektif dalam membuat berita. Ia mencontohkan, hal paling kecil atau berita yang sepele, misalnya, berita peluncuran atau peresmian gedung. Meski gedung itu memiliki nilai berita tinggi tapi wartawan menerima amplop tak akan bisa kritis. Misalnya, jika

menerima amplop maka tidak akan menulis gedung tersebut dikaitkan dengan keberadaan pasar tradisional. Padahal, jika wartawan independen maka beritanya cenderung untuk bersikap kritis terhadap peristiwa atau pernyataan narasumber yang merugikan kalangan lemah.

Selain itu, tambah W-3, jika wartawan sudah menerima amplop maka jika beritanya tidak dimuat maka akan menjadi beban tersendiri. Sebab, narasumber yang memberi amplop akan mengejar agar beritanya dimuat. “Ibaratnya *piye to wis dikei duit kok ga dimuat-muat* (gimana sudah diberi uang kok beritanya nggak dimuat),” kata W-3. Caranya, narasumber akan menelpon para wartawan yang sudah menerima amplop itu. “Jadi, menurutku tidak usah menerima amplop sebab otoritas pemuatan bukan pada wartawan tapi pada di struktur media, seperti redaktur, serta kualitas berita: jika kualitas berita tak bagus maka nggak usah dimuat,” kata W-3.

Sedangkan W-11 (wartawan cetak nasional) menyatakan penerimaan amplop sangat terkait dengan obyektifitas. Sebab, kata dia, jika menerima amplop maka tidak obyektif dalam membuat berita. “Saya tidak menerima amplop juga supaya tidak bias dalam membuat berita,” katanya. Apalagi, kata W-11, banyak narasumber yang menyelipkan pesan-pesan tertentu setelah memberikan amplop. “Ada narasumber yang mengarahkan. Misalnya narasumber bilang: “Udahlah nggak usah dibesar-besarkan. Anggap saja udah selesai,” katanya.

Sementara wartawan media televisi nasional menilai bahwa masalah amplop dan obyektifitas itu masih agak kabur. Sebab, kata W-9 (televisi

nasional) hal itu tergantung karakter media dan jenis media. “Kadang ada hubungan, kadang tidak,” ujarnya. Tapi, kata dia, di televisi sangat jarang ada narasumber yang memberi amplop untuk meminta tidak menayangkan suatu berita. Apalagi di televisi, utamanya adalah berita-berita kejadian atau peristiwa sehingga tayang tidaknya tergantung bagus tidak peristiwanya. “Makanya teman-teman sekarang juga mulai menggeser, kalau dimungkinkan tidak bisa tayang maka tidak mendatangi acara,” kata dia. Sebab, daripada sudah menerima amplop tapi tidak tayang maka akan selalu ditanya narasumbernya. “Daripada beban maka tidak usah. Kita pilih yang kira-kira memang bisa tayang,” katanya.

3.7.2 Terima Amplop Tetap Merasa Bisa Obyektif

Jurnalis yang menganggap bahwa amplop tidak ada kaitannya dengan obyektifitas adalah jurnalis yang bersikap mau menerima amplop. Meski menerima amplop, tapi mereka menyatakan akan selalu berusaha untuk meliput berita sesuai dengan kenyataan dan keyakinan yang diketahuinya. “Saya tetap berusaha apapun yang saya liput ya itu yang saya sampaikan. Karena saya anggap ketika saya dapat *fresh money* maka itu sebagai uang transport. Saya berusaha buat berita tanpa dipengaruhi amplop,” kata W-4 (jurnalis radio). Lalu bagaimana jika berita yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan si pemberi amplop? W-4 mengakui selama ini berita radio jarang diprotes oleh si pemberi narasumber. Sebab, pemantauan berita di radio susah dilakukan.

Untuk menyiasatinya, biasanya narasumber meminta kepada wartawan untuk memberikan rekaman siaran beritanya dalam bentuk *compact disc (CD)*.

“Biasanya siang atau sore disiarkan lalu malam diminta CD-nya. Kalau yang kayak gini terutama event-event yang menggunakan pihak ketiga seperti event organizer atau konsultan mediana maka dia minta CD-nya. Tapi kalau swasta jarang sekali. Biasanya hanya tanya: kapan tayang Mas,” kata dia. Sebab, acara yang digelar menggunakan event organizer maka dibutuhkan beritanya sebagai bukti memang benar-benar dimuat atau ditayangkan di media massa.

W-6 (jurnalis televisi lokal) juga merasa masih bebas membuat berita meski dirinya menerima amplop . “Ya semau ku untuk membuat berita,” kata dia. Karena sikapnya seperti itu, maka W-6 pernah mendapatkan komplain dari narasumber yang sudah memberikan amplop. “Komplain itu dari narasumber di pemerintahan. Beritanya kritis padahal sudah diberi tips. Mereka tidak terima karena masih menjelek-jelekan,” katanya. W-6 mengakui hanya membiarkan protes yang seperti itu. W-6 menganggap bahwa amplop itu sebagai rejeki sehingga dia merasa bebas membuat berita apapun. “Jika ada hal buruk maka saya akan memberitakan sebagai berita buruk,” katanya. Namun, tindakannya itu tentu menimbulkan dampak. Pernah suatu ketika, dia membuat berita yang negatif meski sudah diberi amplop. “Saya diprotes, lalu saya jelaskan dan saya ingin mengembalikan tips yang sudah diberikan itu, tapi narasumbernya menolak,” kata dia. W-6 mengakui kadang memang ada rasa sungkan kepada narasumber yang sudah memberikan amplop.

Sementara W-7 (wartawan cetak lokal) memiliki alasan tersendiri jika ada narasumber memberi amplop tapi melakukan protes karena beritanya tidak sesuai yang diharapkan. “Kalau ada complain ya saya jawab: amplop nggak ada

ikatan kok menuntut berita bagus,” katanya. Yang terpenting, kata W-7, dirinya tidak pernah mendatangi narasumber untuk meminta uang. “Nggak pernah ada transaksi yang larinya mengarah ke amplop. Yang penting saya dapat informasi, tapi kalau ada amplop ya saya terima tapi kalau nggak ada ya nggak masalah,” katanya. W-7 mengakui memang ada beberapa narasumber yang sulit membuat kita obyektif. Narasumber itu, kata dia, adalah narasumber sudah sangat akrab.²³ Terlepas dari memberikan amplop atau tidak tapi jika sudah akrab maka sulit independen. “Misalnya narasumber yang sudah dekat terkena masalah, nah disitu saya agak *ewuh pakewuh* memberitakannya. Akhirnya ya saya bikin berita dengan cara halus agar tidak menyinggungnya,” kata dia.

Sedangkan W-8 menyatakan bahwa masalah amplop kaitannya dengan obyektifitas berita memang bersifat subyektif. Masalah obyektif ini masalah pilihan masing-masing jurnalis. “Ada yang tetap kritis meski dikasih macam-macam. Ada yang sudah diberi tapi nggak bisa kritis,” kata dia. Tapi, tambahnya, sangat naif jika obyektifitas hanya dinilai dari imbalan. Sebab, kata dia, ada masalah lain yang harus dipertimbangkan sebuah berita pantas dibuat atau tidak. Ada berita yang bagus tapi nggak pantas. Misalnya, kata dia, ada

²³ Pada, 3 Maret 2011, Pimpinan DPRD menggelar rapat pertemuan dengan Sekda di lantai II DPRD Jawa Tengah. Para wartawan menunggu di ruang lobi lantai II tersebut. Usai rapat, sekda malah langsung kembali ke kantornya. Sedangkan para wakil ketua DPRD kembali ke ruangannya masing-masing. Salah satu Wakil Ketua DPRD enggan memberik keterangan mengenai pertemuan. Wakil pimpinan DPRD itu justru mengajak para wartawan bertemu ke ruangannya. Saat seluruh wartawan sudah masuk ke ruangannya justru tidak ada wawancara. Ia bingung karena merasa tidak ada materi yang bisa diwawancarakan dengan wartawan. “Kesini hanya kenalan dengan ruang baru,” katanya. Sebelum wartawan pulang, pimpinan DPRD tersebut memanggil salah satu stafnya. Staf itu mengambil stopmaf berisi amplop. Amplop tersebut lalu diberikan kepada salah satu wartawan. Wartawan ini lalu membagi-bagi kepada teman-temannya. Seorang informan berujar isi amploinya Rp 200 ribu.

berita ribuan jawaban ujian nasional tidak bisa dipindai. Kalau berita itu dibuat maka dampaknya akan buruk karena akan membuat resah peserta ujian nasional dan orang tuanya.

Jawaban agak trengginas mengenai masalah amplop dan obyektifitas berita disampaikan W-10 (jurnalis cetak lokal). “Yang penting saya nggak njaluk (minta). Saya nggak memaksa. Tiap mereka ngasih, buatku tak ambil, tapi dari sisi soal pemberitaan ya lain, beritanya jelek tetap saya sikat dengan berita jelek. Saya tetap menulis berita seadanya,” kata dia.

Apakah tidak takut jika diprotes, W-10 menyatakan tidak karena narasumber juga punya hak jawab. W-10 juga pernah memiliki pengalaman diprotes narasumber pemberi amplop. Ceritanya: ada satu kasus konflik dua belah pihak. Ada dua pengacara memberikan amplop yang diterima semua. “Kanan kiri saya terima. Berita saya bikin sesuai dengan keyakinan obyektifitas saya. Lha ada salah satu pengacara yang tak terima. Dia protes. Ya saya biarkan saja. Saya bilang ada hak jawab, silahkan digunakan. Bagi saya ini berita tetap berita. Nggak ada hubungannya berita dengan amplop. Kalau baik ya saya tulis baik kalau jelek ya saya tulis jelek meski kasih amplop saya tidak peduli,” katanya. Namun, W-10 mengakui bahwa ada beberapa narasumber yang memberikan pesan-pesan tertentu setelah memberikan amplop. Misalnya: “Mas ini, dibantu-bantu ya”. “Seringnya seperti itu,” kata dia.

3.8. Larangan Amplop di Perusahaan dan Organisasi Profesi

Faktor lain yang terkait dengan praktik amplop adalah masalah aturan di perusahaan media. Aturan bagi wartawan sangat penting karena mereka bekerja

dibawah perusahaan media. Idealnya, agar wartawan tidak menerima amplop dan menyalahgunakan profesinya maka perusahaan media harus memberlakukan aturan beserta pengawasan yang ketat. Sebab, para jurnalis itu bekerja meliput di lapangan berdasarkan atas nama perusahaan medianya. Persoalannya, apakah di masing-masing perusahaan media ada aturan yang jelas serta pengawasan yang ketat mengenai larangan amplop itu?

Rata-rata, para informan yang bekerja sebagai jurnalis menyatakan secara ideal aturan soal larangan menerima amplop dari perusahaannya memang ada. Namun, pelaksanaan di lapangan bisa berbeda jauh. Sebab, aturan itu kadangkala tidak konsisten dilaksanakan. Perusahaan media juga tidak mendefinisikan secara tegas apa saja yang boleh dan tidak boleh diterima dari narasumber. Ada tidaknya sanksi terhadap pelanggar aturan juga sangat menentukan. Hanya ada beberapa media yang memang benar-benar konsisten melaksanakan aturan larangan wartawan menerima amplop.

W-1 (wartawan televisi lokal) menyatakan sebenarnya di perusahaan medianya tidak memperbolehkan wartawan menerima amplop dari narasumber. Tapi, pengawasannya tidak diperketat seperti Kompas. W-2 yang bekerja di media cetak lokal mengakui bahwa pada saat dirinya mulai bekerja tidak ada penekanan soal larangan menerima amplop. “Nggak ada pengawasan sama sekali. Kelihatannya bebas-bas. Kayak sudah tahu sama tahu,” katanya. W-2 menambahkan perusahaan media tidak menegakan aturan soal amplop karena kemungkinan perusahaan media merasa tidak kuat memberi gaji tinggi sehingga perusahaan mengesahkan amplop itu sebagai penghasilan wartawannya.

“Karena mereka *toh* nggak berani memberikan upah yang sekiranya layak dihitung sesuai kebutuhan wartawan. Kalau mereka melarang maka mereka akan takut. Sebab, bisa saja para wartawan akan menggugat. Kenapa melarang menerima amplop *toh* nggak bisa membayar gaji besar kok,” katanya.

Sementara itu, W-3 yang bekerja freelance di salah satu media menyatakan bahwa di perusahaannya sangat ketat dalam masalah amplop. “Mereka melarang menerima dalam bentuk apapun. Gratifikasi dalam bentuk apapun. Kode etik itu dibuat sendiri oleh perusahaan kami. Bahkan, larangan itu bukan di nota kontrak, tapi juga dipajang di publik, seperti di websitenya ada tercantum kode etik,” katanya. Ia mencontohkan bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara kroscek. Misalnya seorang wartawan membuat berita seringan apapun maka redaktur atau kepala biro akan kontak dengan orang-orang yang dikenal dan tahu soal berita tersebut. Entah itu narasumber langsung atau jurnalis lain. Tidak hanya mengecek ke satu orang tapi bisa sampai dua hingga tiga orang. Fungsi cek acak tersebut sangat banyak. Mulai dari klarifikasi berita itu benar atau tidak. Wartawan ke lapangan atau tidak. Itu berita sumir atau *tenanan* (sungguhan) hingga wartawan menerima amplop atau tidak. Jika diketahui menerima amplop maka akan diberhentikan atau dipecat.

W-4 (wartawan radio) menyatakan bahwa di perusahaannya memang ada aturan soal amplop di dalam kontrak kerja. Tapi, praktik di lapangan berbeda. Tidak ada pernah terkena kasus karena masalah amplop lalu dipersalahkan dan sampai dipecat. “Juga tidak ada sanksi (bagi yang menerima

amplop). Karena korlipnya (koordinator liputan) sendiri posisinya lemah sekali,” katanya.

W-5 (koresponden cetak nasional menyatakan bahwa di perusahaan medianya ada larangan soal amplop. Namun, W-5 sendiri menyatakan tidak tahu bagaimana model pengawasan dari perusahaannya. Selama ini, kata W-5, model yang dibangun adalah kepercayaan. W-5 bisa menjadi koresponden di media tersebut karena sudah dipercaya. Perusahaan bisa percaya karena sudah mendapatkan informasi soal jejak rekam W-5.

W-6 (wartawan televisi lokal) menambahkan bahwa aturan soal amplop di perusahaannya masih abu-abu. “Tidak jelas. Di kontrak kerja juga tidak ada. Adanya hanya pada saat di aturan pada saat penyaringan. Itupun tidak ada penekanan atau dibebankan. Artinya hanya ditegaskan: silahkan menerima amplop tapi jangan sampai memeras meminta atau mengancam narasumber,” kata dia. Penekanan itupun tidak secara tertulis, tapi hanya dijelaskan di forum pada saat penyaringan (mau masuk kerja). Pengawasan di lapangan pun tidak ada. “Tidak, karena pemilik menilai dan menyadari bahwa pekerja media itu gaji yang diberikan belum memadai atau belum sesuai standar apalagi jika dibandingkan yang diberikan wartawan ke perusahaan,” katanya.

W-7 (wartawan cetak lokal) menyatakan bahwa secara ideal perusahaannya memang melarang wartawan menerima amplop. Tapi, kata dia: “Kalau kantor sifatnya seperti *ngecolke sirah tapi nyekel buntut* (melepas kepala tapi memegang buntut). Kadang-kadang ada larangan kadang ya dibiarkan”.

Melarangnya seperti apa? “Ya melarang tidak sampai tegas sih. Hanya bilang sepanjang tidak meminta-minta atau memaksa,” jawab W-7.

W-8 (wartawan online) menyatakan perusahaannya tidak ada sistem pengawasan. “Tapi mungkin kode etik dalam diri seorang jurnalis kan ada,” kata dia. W-9 (televisi nasional) menyatakan tidak ada pengawasan karena koresponden di daerah tidak punya kantor. W-10 (wartawan cetak lokal) menyatakan secara larangan memang ada, yakni semua wartawan dilarang menerima amplop. Larangan itu dalam kontrak kerja. Diperingati secara lisan juga ada. Tapi, kata dia, selama ini memang kantornya tidak tegas. “Mungkin tahu sama tahu. Kantor memang fleksibel. Kayaknya ya tahu sama tahu. Kantor tahu tapi dibiarkan mungkin dianggap sebagai rezeki wartawannya,” kata dia. Akibatnya, tidak pernah ada wartawan yang dipecat gara-gara menerima amplop.

Larangan menerima amplop secara tegas di perusahaan media hanya diungkapkan oleh W-11 (cetak nasional). Menurutnya, sejak wartawan diterima untuk magang maka proses-proses pengawasan dilakukan secara ketat. Jika diketahui ada wartawan yang menerima amplop maka langsung dipecat. Selama ini, kata W-11, bentuk pengawasannya berjalan dari dua arah. Selain dari perusahaan, pengawasan juga ada dari public/narasumber. Ia mencontohkan, jika ada wartawan perusahaan ini menerima amplop maka narasumber justru yang melaporkan ke perusahaan media. “Selama ini kami dilarang menerima amplop. Jika ada yang menerima maka pemberinya atau pihak yang mengetahui

melaporkan ke kantor. Biasanya mereka menyatakan: “Kok wartawan.....²⁴ ada yang menerima atau bahkan meminta amplop” katanya. Redaksi lalu melakukan kroscek ke wartawan yang bersangkutan atau juga dicari bukti-buktinya. Kalau memang kroscek dan bukti-bukti menguatkan bahwa wartawan bersangkutan menerima amplop maka dipecat.

Lalu bagaimana dengan pengawasan oleh organisasi profesi? Perlu diketahui bahwa tidak semua wartawan menjadi anggota organisasi profesi kewartawanan. Peneliti menemukan dari beberapa organisasi profesi, memang ada yang tegas melarang wartawannya menerima amplop tapi ada pula yang tidak tegas melarang wartawannya menerima amplop. W-2 (wartawan cetak lokal) yang ikut aktif di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan AJI merupakan sebuah wadah organisasi profesi yang punya kode etik sangat ketat. “Organisasi lain juga punya, tapi AJI punya kode etik yang melarang menerima amplop dan benar-benar ditegakkan. Sehingga sepertinya saya merasa diwadahi di AJI, yang memiliki komitmen penegakan kode etik secara utuh,” kata dia.

W-3 yang juga ikut AJI menyatakan bahwa untuk menjadi anggota AJI harus melalui proses seleksi yang ketat. “Ada verifikasi calon anggota. Nggak pandang bulu, meski ada wartawan media asing yang besarpun tetap masih harus mengikuti verifikasi,” katanya. Jika diketahui wartawan tersebut memiliki problem di masa lalu maka akan kesulitan masuk ke AJI. Ada semacam tim kecil yang akan menyeleksi atau mengorek calon anggota dari sumber lain

²⁴ Informan menyebutkan sebuah perusahaan media. Peneliti sengaja tidak menyebutkan nama perusahaannya.

untuk mengetahui calon anggota bersih atau tidak. Selain itu juga ada konfirmasi dengan anggota AJI lain.

W-5 (koresponden cetak nasional) yang aktif di AJI Semarang menyatakan organisasi profesi yang diikutinya selalu melakukan pengawasan terhadap para anggotanya. Cara pengawasannya adalah berdasarkan informasi yang diterima baik dari narasumber maupun sesama jurnalis. W-5 menyatakan praktik amplop bisa dilacak karena jika ada wartawan yang menerima maka akan ada yang mengetahuinya. Jika terbukti, kata W-5, maka wartawan yang menerima amplop tersebut diberi sanksi, yakni dikeluarkan.

Sedangkan W-9 (jurnalis televisi) yang ikut PWI menyatakan selama ini dari organisasi profesinya tidak ada pengawasan yang ketat terhadap perilaku penerimaan amplop dari narasumber. Saat peneliti menanyakan dari organisasi apakah ada pengawasan? W-9 menjawab: "Tidak ada juga". Sementara W-11 (cetak nasional) dirinya tidak ikut dalam organisasi profesi mana pun. "Sebenarnya tertarik juga. Tapi karena waktunya yang nggak memungkinkan ya akhirnya nggak bisa. Kapan saya bisa beraktifitas di organisasi kalau waktunya full banget begini untuk kerjaan wartawan. Apalagi saya sekarang sudah punya keluarga, jika ada waktu luang ya untuk keluarga," katanya.